

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAPUAS HULU

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun anggaran 2024. Laporan Kinerja ini merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun terakhir dalam masa Renstra DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2022-2026, yang disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra Tahun 2022-2026).

LKIP DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu disusun berdasarkan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LKIP DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja DPMPTSP. Komitmen dalam penyusunan LKIP DPMPTSP, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi DPMPTSP untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKIP DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 terdiri atas: Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja serta Penutup. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti latar belakang, maksud dan tujuan, serta isu strategis. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menyajikan tentang perencanaan kinerja DPMPTSP pada tahun 2024. Sedangkan

aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu tahun 2024, termasuk analisa atas efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2024 pada DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu telah membuahkan hasil pembangunan. Dari tiga indikator kinerja utama, ketiganya telah memenuhi kriteria yang memuaskan. Kinerja yang tercermin dari capaian atas sejumlah *outcome* yang masuk kategori sangat tinggi tersebut, tidak terlepas dari orientasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan secara terpadu, fokus, dan berkelanjutan. Keterpaduan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi koordinasi yang efektif dan efisien.

Namun disadari, masih terdapat kekurangan dalam pencapaian sasaran dan visi misi organisasi. Semoga LKIP DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Putussibau, Januari 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAPUAS HULU,**



DIDIK WIDIYANTO, S.Sos., M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP 19710312 199101 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan, mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun perkembangan dalam bidang pelayanan perizinan dan nilai realisasi investasi. Keberhasilan di dalam memberikan pelayanan perizinan dan peningkatan realisasi investasi di daerah ini tentunya bukan hanya keberhasilan dari DPMPTSP semata, tetapi juga menggambarkan keberhasilan dan dukungan serta partisipasi masyarakat yang telah memiliki kesadaran untuk membuat izin usaha serta koordinasi yang baik dengan dinas terkait, dan dalam hal kepercayaan pelaku usaha atau investor terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sangat membantu dalam peningkatan realisasi investasi tersebut.

Capaian Indikator Input atau Realisasi penggunaan dana DPMPTSP Tahun Anggaran Perubahan 2024 secara keseluruhan mencapai Rp 3.758.267.874,00 atau 96,51% dari total pagu anggaran sebesar Rp.. 3.893.993.700,00 . Adapun Capaian Indikator *Outcome* pada Tahun 2024 dari 3 (tiga) Sasaran dan 4 (empat) Indikator Kinerja rata-rata telah tercapai.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu telah melaksanakan perizinan dan non perizinan sebanyak 125 jenis perizinan dan

non perizinan secara *online*. Hal tersebut memberikan manfaat berupa kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh izin. Dengan adanya layanan perizinan secara daring (OSS RBA) sehingga masyarakat tidak perlu lagi mendatangi kantor DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu untuk memperoleh izin. Kemudahan memperoleh izin ini memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan para investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Kapuas Hulu. Hal ini tentunya akan memberikan efek turunan bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu.

Berdasarkan target Renstra perubahan DPMPTSP, maka capaian target Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 0.1 Capaian Target Renstra Perubahan 2021-2026 Tahun Anggaran 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi Sampai dengan tahun 2024	% Capaian
1. Menciptakan Iklim Penanaman Modal yang kondusif dan berdaya saing	1. Nilai Realisasi Investasi berdasarkan pemenuhan komitmen	74,18 Milyar Rupiah	212,468 Milyar Rupiah	286,42
	2. Nilai Realisasi Investasi berdasarkan laporan penanaman modal	346 Milyar Rupiah	695,376 Milyar Rupiah	200,98
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	Nilai SAKIP	69,50	69,71	100,38
3. Meningkatnya kualitas Pelayanan publik DPMPTSP	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	83,00	89,82	108,2



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM.....	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi	2
3. Tugas Pokok dan Fungsi	3
4. Sumberdaya Aparatur (SDA).....	11
5. Sumberdaya Keuangan	14
6. Sarana dan Prasarana	15
B. ISU-ISU STRATEGIS (<i>STRATEGIC ISSUED</i>).....	17
C. SISTEMATIKA PENULISAN.....	18
BAB II	21
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	21
A. RENCANA STRATEGIS	21
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	24
C. PERJANJIAN KINERJA.....	26
BAB III	28
AKUNTABILITAS KINERJA	28
A. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	32
B. REALISASI ANGGARAN.....	67
C. INOVASI.....	80
BAB IV.....	83
PENUTUP	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Struktur Organisasi DPMPTSP.....	3
Gambar 1-2 Pembagian Pegawai Menurut Gender.....	13
Gambar 3.1 Target Nilai Realisasi Berdasarkan Pemenuhan Komitmen 2021-2026 ...	34
Gambar 3.2 Target Nilai Realisasi Investasi Berdasar LKPM	43
Gambar 3.3 Rencana Target Nilai/Predikat SAKIP 2022-2026	49
Gambar 3.4 Rencana Target Nilai SKM 2021-2026	61
Gambar 3.5 Dokumen Perizinan yang menggunakan QR Code.....	81
Gambar 3.6 Pelayanan Bergerak DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Capaian Target Renstra Perubahan 2021-2026 Tahun Anggaran 2024	iv
Tabel 1.1 Komposisi PNS dan non PNS DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu	11
Tabel 1.2 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan Kepangkatan dan Tingkat Pendidikan	11
Tabel 1.3 komposisi pengisian Jabatan Fungsional.	12
Tabel 1.4 Jumlah Dana DPMPTSP Tahun 2024.....	14
Tabel 1.5 Rincian anggaran per Program	14
Tabel 1.6 Sarana dan Prasarana Yang Tersedia di DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu.....	15
Tabel 2.1 Indikator sasaran RPJMD dan sasaran jangka menengah DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu periode Renstra (2021-2026).....	23
Tabel 2.2 Indikator sasaran dan program DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu periode Renstra (2021-2026)	23
Tabel 2.3 Tujuan , Sasaran, Strategi dan Kebijakan (Renstra 2021-2026).	25
Tabel 2.4 target sasaran strategis tujuan dan sasaran per periode.....	26
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja DPMPTSP (IKU) Kab. Kapuas Hulu Tahun 2024	27
Tabel 3.1 Mekanisme pengumpulan data pengukuran kinerja yang digunakan	29
Tabel 3.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja.	31
Tabel 3.3 ringkasan penerbitan perizinan berusaha melalui OSS RBA dan nilai investasi per sektor tahun 2024	35
Tabel 3.4 Jumlah Dokumen Non Perizinan Melalui SiCantik dan SIMBG	35
Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja Sasaran 1 indikator 1.	36
Tabel 3.6 Sumber Daya Dan Tingkat Efisiensi Untuk Mencapai Sasaran Strategis 1 Indikator 1	37
Tabel 3.7 Program & kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja	37
Tabel 3.8 Tabel realisasi kinerja tahun 2022, 2023 dan 2024	38
Tabel 3.9 Perbandingan realisasi indikator realisasi kinerja tahun dan target akhir Renstra	39
Tabel 3.10 Pencapaian Kinerja Sasaran 1 indikator 2.....	43
Tabel 3.11 Sumber Daya Dan Tingkat Efisiensi Untuk Mencapai Sasaran Strategis 1 Indikator 2	44
Tabel 3.12 kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	45
Tabel 3.13 realisasi nilai realisasi investasi berdasarkan LKPM tahun 2022, 2023 dan 2024 .	46
Tabel 3.14 Perbandingan realisasi indikator realisasi kinerja tahun dan target akhir Renstra ..	47
Tabel 3.15 perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan target Nasional	47

Tabel 3.16 rincian hasil evaluasi per komponen penilaian	50
Tabel 3.17 Rencana Tindak Lanjut atas rekomendasi LHE SAKIP tahun 2023	52
Tabel 3.18 Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Tahun 2024.....	52
Tabel 3.19 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	53
Tabel 3.20 Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Maupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	56
Tabel 3.21 Realisasi Nilai SAKIP Tahun 2023 dan 2024	58
Tabel 3.22 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Akhir Dalam Dokumen Renstra	59
Tabel 3.23 Hasil Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2024	61
Tabel 3.24 Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik DPMPTSP Tahun 2024.....	62
Tabel 3.25 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	63
Tabel 3.26 Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Maupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	64
Tabel 3.27 Analisis Realisasi Kinerja Dan Capaian Kerja Tahun 2024 Dengan Tahun Sebelumnya.....	65
Tabel 3.28 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Akhir Dalam Dokumen Renstra	65
Tabel 3.29 Realisasi Kinerja Dan Anggaran Per Sasaran Tahun 2024.....	67
Tabel 3.30 Realisasi Belanja Langsung Tahun 2024	69



DAFTAR LAMPIRAN

1. IKU DPMPTSP ;
2. Cascading;
3. Pohon Kinerja;
4. Perjanjian Kinerja 2024;
5. Pengukuran Kinerja 2024;
6. Tata Cara Pengumpulan dan pengukuran kinerja;
7. Rencana Kerja 2024;
8. Rencana Aksi Tahun 2024;
9. Rekapitulasi Nilai Realisasi Investasi Melalui Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS RBA) Per Sektor tahun 2024;
10. Rekapitulasi Nilai Realisasi Investasi Melalui Penyampaian LKPM tahun 2024;
11. Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2023;
12. Penghitungan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Penyusunan LKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah diperjanjikan.

Proses penyusunan LKIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu.

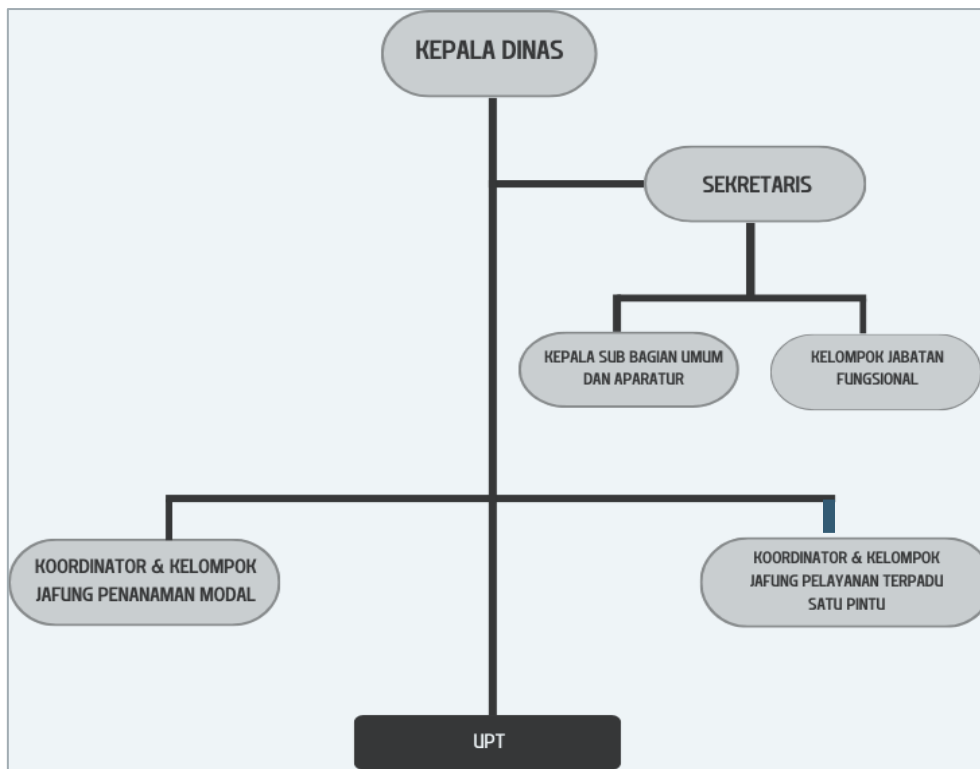
LKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis

instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Organisasi Perangkat Daerah wajib membuat LKIP dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

2. Susunan Organisasi

Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan re-organisasi perangkat daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dengan peraturan tersebut Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu berubah namanya menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2022 yaitu membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah. Adapun Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas hulu adalah sebagai berikut :

- Kepala Dinas
- Sekretariat
- Kelompok Jabatan Fungsional
- Unit Pelaksana Teknis (UPT)



Gambar 1-1 Struktur Organisasi DPMPTSP.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Tugas Pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2022 adalah: ” *Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*”.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ;
2. Pelaksanaan urusan pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas ;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas

memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan kewenangan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Kepala Dinas melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penetapan rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Pengkoordinasian seluruh kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan instansi lainnya;
- c. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, dan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;
- d. Penyelenggaraan pembangunan Reformasi Birokrasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, administrasi perkantoran, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, serta evaluasi dan pelaporan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Untuk

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program kerja sekretariat;
- b. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan penyusunan program kerja Dinas;
- c. Pengelolaan urusan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
- e. Pengelolaan urusan administrasi perlengkapan, aset , kebersihan dan keamanan Dinas;
- f. Penyelenggara tata usaha persuratan, kearsipan dan perpustakaan;
- g. Penyelenggara akuntabilitas kinerja, keprotokolan, pelayanan publik, informasi publik, pengaduan masyarakat, hubungan masyarakat dan prosedur kerja;
- h. Pengoordinasian dan penyelenggaraan reformasi birokrasi Dinas;
- i. Pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sekretariat dibantu oleh :

a) Subbagian Umum dan Aparatur

Subbagian umum dan aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum dan Aparatur yang berada di bawah serta bertanggungjawab kepada sekretaris. Subbagian umum dan aparatur mempunyai tugas membantu

sekretariat dalam pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, serta pengelolaan asset milik Dinas.

Untuk melaksanakan tugasnya subbagian umum dan aparatur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
- b. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan aparatur Dinas;
- c. Penyelenggaraan urusan penatausahaan surat menyurat;
- d. Penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian;
- e. Penyelenggaraan urusan administrasi asset;
- f. Penyelenggaraan urusan data pembangunan, pelayanan publik, informasi publik, pengaduan masyarakat, hubungan masyarakat, prosedur kerja, perpustakaan dan kearsipan;
- g. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b). Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jenis jabatan fungsional sesuai bidang keahlian dan ketrampilan, sesuai ketentuan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenjang dan jumlah pejabat fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja. Pejabat fungsional melaksanakan tugas

dan fungsi pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan ketrampilan tertentu.

Kelompok jabatan fungsional yang diangkat melalui penyetaraan jabatan / impassing, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka memudahkan pelaksanaan tugas, dapat diangkat Koordinator Jabatan Fungsional.

1. Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal, menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkajian, pengusulan dan penyusunan rencana umum, rencana strategis, dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
 - b. Pengkajian, pengusulan dan penyusunan deregulasi / kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
 - c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
 - d. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
 - e. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;

- f. Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
 - g. Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
 - h. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal dan pendampingan hukum;
 - i. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
 - j. Pembangunan, pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
 - k. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasar sektor usaha; dan
 - l. Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- b. Pelaksanaan pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan non perizinan;
- c. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan, pelaksanaan pemberian informasi publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan non perizinan;
- d. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
- e. Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan non perizinan;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
- g. Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan pada masyarakat, dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Tim Teknis

Pada kelompok jabatan fungsional dapat dibentuk tim teknis yang beranggotakan perangkat dinas teknis terkait sesuai kebutuhan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan, yang memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Tim teknis bertugas memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi atas penerbitan perizinan berusaha dan non perizinan.

4) Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan Sekretaris.

4. Sumberdaya Aparatur (SDA)

Sumber daya manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 berjumlah 17 orang yang berstatus sebagai ASN. Sedangkan non ASN (tenaga kontrak) 8 orang.

Tabel 1.1 Komposisi PNS dan non PNS DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu

No.	Nama Jabatan	Jumlah			
		Jabatan Administor	Jabatan Fungsional	Fungsional Umum	Pelaksana Non ASN
1	Kepala Dinas	1	-	-	-
2	Sekretariat	1	2	3	6
3	Kasubbag. Umum & Aparatur	1	-	-	-
4	Kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal	-	1	1	-
5	Kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu satu Pintu	-	3	4	2
6	Tim Teknis	-	-	-	-
7	UPT	-	-	-	-
Jumlah		3	6	8	8

Adapun komposisi pendidikan aparatur DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.2 Sumber Daya Aparatur Berdasarkan Golongan Kepangkatan dan Tingkat Pendidikan

GOLONGAN	PENDIDIKAN				JUMLAH
	S2	S1	D3	SLTA	
IV/c	1	-	-	-	1
IV/b	-	1	-	-	1
IV/a	1	-	-	-	1
III/d	1	4	-	-	5
III/c	1	-	-	-	1
III/b	-	1	-	1	2

GOLONGAN	PENDIDIKAN				JUMLAH
	S2	S1	D3	SLTA	
III/a	-	1	1	-	2
II/d	-	-	-	-	-
II/c	-	-	1	2	3
II/b	-	-	-	-	-
P3K/ Honor Daerah	-	2	2	5	9
JUMLAH	4	9	4	8	25

Berdasarkan tabel diatas, tingkat pendidikan ASN pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu sudah cukup memadai karena jumlah ASN yang berkualifikasi D3, S1, dan S2 sebanyak 17 orang atau sebesar 68% dari total aparatur DPMPSTSP Kab. Kapuas Hulu yang berjumlah 25 orang.

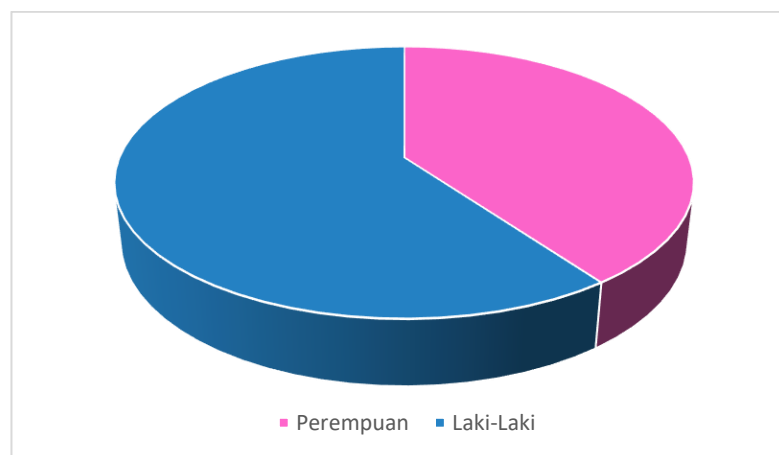
Berkaitan dengan pengisian jabatan struktural, keadaan saat ini setelah terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyisakan 3 (tiga) jabatan struktural, yaitu Kepala Dinas, Sekretaris, dan Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur pada akhir tahun 2024. Regulasi tersebut menjadi dasar langkah strategis pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya akselerasi layanan publik.. Adapun komposisi pengisian Jabatan Fungsional selengkapnya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3 komposisi pengisian Jabatan Fungsional.

Nama Jabatan Struktural	Penyetaraan Jabatan Fungsional	Jumlah
Kepala Bidang Penanaman Modal	Penatakelola Penanaman Modal Ahli Madya	Kosong
Kepala Bidang Pelayanan dan Informasi Penanaman Modal	Penata Perizinan Ahli Madya	1 orang

Nama Jabatan Struktural	Penyetaraan Jabatan Fungsional	Jumlah
Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1 orang
Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Penata Perizinan Ahli Muda	1 orang
Kepala Seksi Data dan Informasi Penanaman Modal	Penata Perizinan Ahli Muda	1 orang
Kepala Seksi Pengendalian Penanaman Modal	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1 orang
Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda	Kosong

Adapun berdasarkan gender, dari keseluruhan pegawai yang berjumlah 25 orang sebanyak 15 orang adalah laki-laki dan 10 orang adalah perempuan. Sedangkan untuk pembagian pegawai menurut golongan kepangkatan kaitannya dengan gender dapat dilihat pada Gambar 1.2 dibawah ini :



Gambar 1-2 Pembagian Pegawai Menurut Gender

Dalam menjalankan tugas PNS DPMPTSP juga dibantu oleh Tenaga Kontrak / Pegawai Tidak Tetap yang berjumlah 8 orang, terdiri dari : Tenaga Administrasi Pengelola Perizinan 2 orang, Tenaga Administrasi Umum 1 orang, Pramuk Kantor 2 orang, dan Tenaga Keamanan 3 orang dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

- Sarjana : 2 orang
- Diploma : 1 orang
- SLTA : 5 orang

5. Sumberdaya Keuangan

Sumber Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu selama tahun 2024, bersumber dari dana APBD Kabupaten Kapuas Hulu dengan total anggaran sebesar Rp 3.893.993.700,00 (*tiga milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga tujuh ratus rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.4 Jumlah Dana DPMPTSP Tahun 2024

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
Belanja Pegawai	1.907.099.000,00	1.862.492.736,00	97,66
Belanja Operasi	1.986.894.700,00	1.895.775.138,00	95,41
Belanja Modal	29.732.120 ,00	29.732.120 ,00	100,00
Jumlah	3.893.993.700,00	3.758.267.874 ,00	96,51

Rincian anggaran per program sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.5 Rincian anggaran per Program

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)			% CAPAIAN
	APBD Murni	APBD Perubahan	Realisasi	
1	2	3	4	5
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	75.074.400	75.074.400	74.505.000	99,24
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	25.828.000	25.828.000	25.154.700	97,39
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	27.590.000	27.590.000	26.721.200	96,85

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)			% CAPAIAN
	APBD Murni	APBD Perubahan	Realisasi	
1	2	3	4	5
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	626.895.000	626.895.000	616.004.800	98,26
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	35.080.000	35.080.000	34.977.300	99,71
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.057.524.114	3.103.526.300	2.980.904.874	97,49
JUMLAH	3.847.991.514	3.893.993.700	3.758.267.874	96,51

6. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menyediakan sarana berupa gedung kantor yang baru selesai dibangun pada awal tahun 2022. Adapun sarana dan prasarana yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6 Sarana dan Prasarana Yang Tersedia di DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu.

No	Nama Barang / Jenis Barang	Banyaknya	Kondisi
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1	Baik
2	Mobil Operasional	1	Baik
3	Sepeda motor	8	Baik
4	Kipas Angin	4	Baik
5	AC	9	Baik
6	Mesin Potocopy	1	Baik
7	Rak Besi	2	Baik
8	Rak Kayu	1	Baik
9	Filling kabinet besi	5	Baik
10	Lemari katalog	1	Baik
11	Mesin penghancur kertas	1	Baik

No	Nama Barang / Jenis Barang	Banyaknya	Kondisi
12	Mesin absensi	1	Baik
13	LCD Projector/Infocus	1	Baik
14	Genset (Alat Kantor Lainnya)	1	Baik
15	Meja Kerja Besi/Metal	2	Baik
16	Kursi Besi/Metal ruang tunggu	3	Baik
17	Meja Resepsionis	1	Baik
18	Kursi Tamu	1	Baik
19	Meja Komputer	2	Baik
20	Meja Kompom	1	Baik
21	Rice Cooker (Alat Dapur)	1	Baik
22	UPS	2	Baik
23	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	27	Baik
24	Automatic Voltage Regulator (AVR)	2	Baik
25	Printer (Peralatan Personal Komputer)	4	Baik
26	Jaringan Listrik Kantor	1	Baik
27	Televisi	1	Baik
28	Tangga Aluminium	1	Baik
29	Vertikal Blind	32	Baik
30	Dispenser	2	Baik
31	Tabung Pemadam Kebakaran	1	Baik
32	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
33	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
34	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	Baik
35	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	Baik
36	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Baik
37	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	2	Baik
38	Kamera Outdoor	1	Baik
39	CCTV (Studio)	1	Baik
40	Kursi Roda	1	Baik
41	P.C Unit	7	Baik
42	Lap Top	8	Baik
43	Note Book	4	Baik
44	UPS (Peralatan Kantor)	2	Baik
45	Printer (Peralatan Personal Komputer)	13	Baik
46	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	4	Baik
47	Router	1	Baik
48	Wireless Access Point	1	Baik

Meskipun telah menempati gedung baru, namun masih perlu dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung seperti pendingin ruangan , meja dan kursi untuk ruang rapat dan aula, kanopi parkir serta pagar.

B. ISU-ISU STRATEGIS (*STRATEGIC ISSUED*)

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu terdapat beberapa isu strategis yang menjadi tantangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

1. Belum lengkapnya dokumen perencanaan investasi daerah

Hal ini berpengaruh terhadap perencanaan pengembangan investasi di daerah. Karena dengan adanya dokumen perencanaan investasi yang lengkap dan disertai data-data yang akurat akan memudahkan para pemangku kepentingan untuk mengambil kebijakan dalam upaya menggerakkan perekonomian daerah dengan menarik datangnya investor untuk berinvestasi di Kabupaten Kapuas Hulu. Adanya dokumen perencanaan investasi daerah juga berpengaruh terhadap upaya DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu untuk mempromosikan peluang investasi yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu agar lebih dikenal luas, terutama di kalangan investor potensial. Belum adanya studi kelayakan terhadap produk unggulan daerah juga menjadi hambatan dalam upaya promosi daerah.

2. Belum optimalnya fungsi pengendalian penanaman modal dan perizinan berusaha

Hal ini berpengaruh terhadap jumlah perusahaan yang tertib administrasi dengan melaporkan perkembangan investasinya melalui Laporan Kegiatan Penanaman

Modal (LKPM) dan jumlah pemilik usaha yang memenuhi dokumen yang menjadi komitmen usahanya.

3. **Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik**

Hal ini disebabkan masyarakat sudah semakin kritis terhadap kualitas layanan yang diterimanya. Namun, sarana dan prasarana pelayanan perizinan dan non perizinan tersedia yang merupakan komponen penting dalam pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan masih belum maksimal. Selain itu, masih kurangnya kuantitas, kualitas dan kompetensi tenaga teknis dan aparatur pelayanan yang menjadi ujung tombak pelayanan perizinan juga berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

4. **Keterbatasan infrastruktur dasar yang tersedia**

Ketersediaan dan kondisi infrastruktur dasar merupakan salah satu faktor yang menjadi daya tarik investasi di daerah. Dengan ketersediaan infrastruktur dasar dapat memperlancar kegiatan perekonomian dan pembangunan pada suatu daerah. Hal ini di samping karena kebutuhan akan pengembangan infrastruktur terasa semakin besar, juga di masa depan semakin banyak tantangan yang harus dihadapi dalam merumuskan kebijakan investasi bagi perkembangan teknologi, maupun sosial, budaya dan politik yang semakin dinamis.

C. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut :

RINGKASAN EKSEKUTIF

Menguraikan tentang tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, serta sejauhmana DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Pada bagian ini juga diuraikan tentang langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mengatasi atau mengantisipasi kendala yang mungkin terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Tugas Pokok dan Fungsi, Isu Strategis serta Sistematika penyusunan LKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan tentang Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu, Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran, cara mencapai Tujuan dan Sasaran, serta Penetapan Kinerja Tahun 2024 yang menjadi acuan pengukuran kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Dalam bab ini juga diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Mengemukakan tinjauan secara umum dengan menjelaskan keberhasilan atau kegagalan, permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan kinerja Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu serta strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja pada periode berikutnya.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perumusan tujuan dan sasaran digunakan dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah, yang mana merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Adapun tujuan yang telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan investasi di Kabupaten Kapuas Hulu, yang diarahkan pada upaya untuk meningkatkan fungsi perencanaan penanaman modal, mengoptimal promosi dan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, mengoptimal proses perizinan penanaman modal, dan meningkatkan fungsi pengendalian investasi.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu yang diarahkan pada upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja yang telah dicapai saat ini, meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan

non perizinan, meningkatkan kompetensi aparatur, dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja yang telah dimiliki.

Berdasarkan tujuan yang telah disepakati tersebut dibuat sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis agar dapat dikelola pencapaiannya. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah.

Adapun Sasaran yang telah dirumuskan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan Iklim Penanaman Modal yang kondusif dan berdaya saing yang diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan promosi penanaman modal serta pelayanan dan pengendalian penanaman modal.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu yang diarahkan pada upaya meningkatkan predikat nilai evaluasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu secara bertahap.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan DPMPSTSP Kab. Kapuas Hulu yang diarahkan pada upaya meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal dan meningkatkan pengelolaan data dan informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok.

Berdasarkan paparan di atas, maka keterkaitan antara sasaran RPJMD dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu pada periode Renstra (2021-2026) sebagai berikut :

Tabel 2.1 Indikator sasaran RPJMD dan sasaran jangka menengah DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu periode Renstra (2021-2026)

Visi : Menuju Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya saing, Amanah dan Terampil		
MISI		
1	Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi	2 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, perwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas
TUJUAN		
Menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka		Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi
SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH		
Meningkatnya investasi daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
SASARAN STRATEGIS OPD		
Menciptakan Iklim Penanaman Modal yang Kondusif dan Berdaya Saing	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik DPMPTSP

Adapun indikator dari setiap sasaran yang akan dicapai DPMPTSP selama periode Renstra 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator sasaran dan program DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu periode Renstra (2021-2026)

SASARAN RPJMD	SASARAN DPMPTSP	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SUMBER DATA
1. Meningkatkan investasi Daerah	Menciptakan Iklim Penanaman Modal yang kondusif dan berdaya saing	1. Nilai Realisasi Investasi berdasar pemenuhan komitmen	Program pelayanan penanaman modal	Persentase dokumen perizinan dan non perizinan diterbitkan sesuai SOP	Rekapitulasi penerbitan izin melalui OSS RBA, SiCantik, SIMBG
		2. Nilai Realisasi Investasi berdasar laporan penanaman modal	Program pengembangan iklim penanaman modal	Persentase dokumen perencanaan PM yang disusun	Dokumen perencanaan penanaman modal
			Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah minat penanaman modal	Laporan minat penanaman modal
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kepatuhan perusahaan menyampaikan LKPM dengan tepat waktu	Rekapitulasi LKPM melalui OSS RBA

SASARAN RPJMD	SASARAN DPMPSTSP	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SUMBER DATA
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi perangkat daerah	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPSTSP	Nilai SAKIP	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten /kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	LHE Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu
	2. Meningkatnya kualitas Pelayanan publik DPMPSTSP	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Nilai SKM Perangkat Daerah	SKM terhadap pelayanan yang diberikan DPMPSTSP

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, maka perlu dirumuskan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai bentuk konkritnya dapat dilakukan penekanan prioritas yang berbeda-beda dalam setiap tahapan tetapi tetap memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya.

Setelah dilakukan kajian terhadap sasaran dan target kinerja tiap tahun serta pemahaman terhadap permasalahan dan mengidentifikasi isu strategis terkait tiap tahun maka dapat dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi aparatur;
2. Meningkatkan tertib pelayanan administrasi;
3. Mengoptimal kualitas perencanaan dan promosi penanaman modal;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan;
5. Mengoptimalkan fungsi pengendalian investasi dan perizinan;

6. Meningkatkan pengelolaan data dan informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok.

Keterkaitan strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai masa periode Renstra (2021-2026) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Tujuan , Sasaran, Strategi dan Kebijakan (Renstra 2021-2026).

Visi	Terwujudnya Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik, Berdaya saing, Amanah dan Terampil		
Misi II	Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan investasi daerah	Menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan berdaya saing	Meningkatkan daya saing penanaman moda	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas perencanaan dan promosi penanaman modal • Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengendalian penanaman modal
Misi IV	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja DPMPPTSP Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada DPMPPTSP	Mengoptimalkan teknologi informasi untuk memperkuat dukungan pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pengelolaan data dan informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan di atas, DPMPPTSP Kabupaten Kapuas Hulu telah merumuskan program-program untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah tertuang di dalam Renstra 2021-2026, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal ;
3. Program Promosi Penanaman Modal;
4. Program Pelayanan Penanaman Modal;
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Adapun target sasaran strategis tujuan dan sasaran per periode adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 target sasaran strategis tujuan dan sasaran per periode.

TUJUAN RPJMD	SASARAN DPMPTSP	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN				
					2022	2023	2024	2025	2026
1. Meningkatkan investasi Daerah	Mencipta kan Iklim Penanaman Modal yang kondusif dan berdaya saing	1. Nilai Realisasi Investasi berdasarkan pemenuhan komitmen	Milyar Rupiah	70	72,72	73.45	74,18	74,92	75.67
		2.Nilai Realisasi Investasi berdasarkan laporan penanaman modal	Milyar Rupiah	300	339	342,67	346	349,56	353
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan RB perangkat daerah	1.Meningkat nya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	Predikat SAKIP	Predikat	BB 78,19	BB 77	B 69,00	B 69,50	BB 70,00	BB 70,25
	2. Meningkatkan kualitas Pelayanan publik DPMPTSP	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Angka	85,32	82,00	82,50	83,00	83,50	84,00

C. PERJANJIAN KINERJA

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu menyusun Perjanjian Kinerja (PK) sebagai wujud komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam

rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian *reward* (penghargaan) dan *punishment* (sanksi).

Perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2024 telah dilaksanakan secara berjenjang dari level Kepala Dinas sampai dengan staf pelaksana, yang mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU), dimana perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang di evaluasi setiap tahun. Dari perjanjian kinerja inilah pengukuran kinerja individu dapat dilakukan.

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja DPMPTSP (IKU) Kab. Kapuas Hulu Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Sumber Data
1	Menciptakan Iklim Penanaman Modal yang Kondusif dan Berdaya Saing	Nilai Realisasi Investasi berdasarkan pemenuhan komitmen	74,18 Milyar Rupiah	Rekapitulasi izin tervalidasi melalui OSS RBA
		Nilai Realisasi Investasi berdasarkan laporan penanaman modal	346 Milyar Rupiah	Rekapitulasi LKPM melalui OSS RBA
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	Predikat SAKIP DPMPTSP	B	Laporan hasil evaluasi Inspektorat Kab. Kapuas Hulu
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik DPMPTSP	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat DPMPTSP	83,00	Hasil penghitungan SKM DPMPTSP

Dari tabel di atas terlihat bahwa penetapan kinerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja telah mengacu dan selaras dengan dokumen perencanaan (Renstra) DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu. IKU sebagai acuan penetapan kinerja pada eselon 3, 4 atau setara serta pada seluruh pelaksana DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

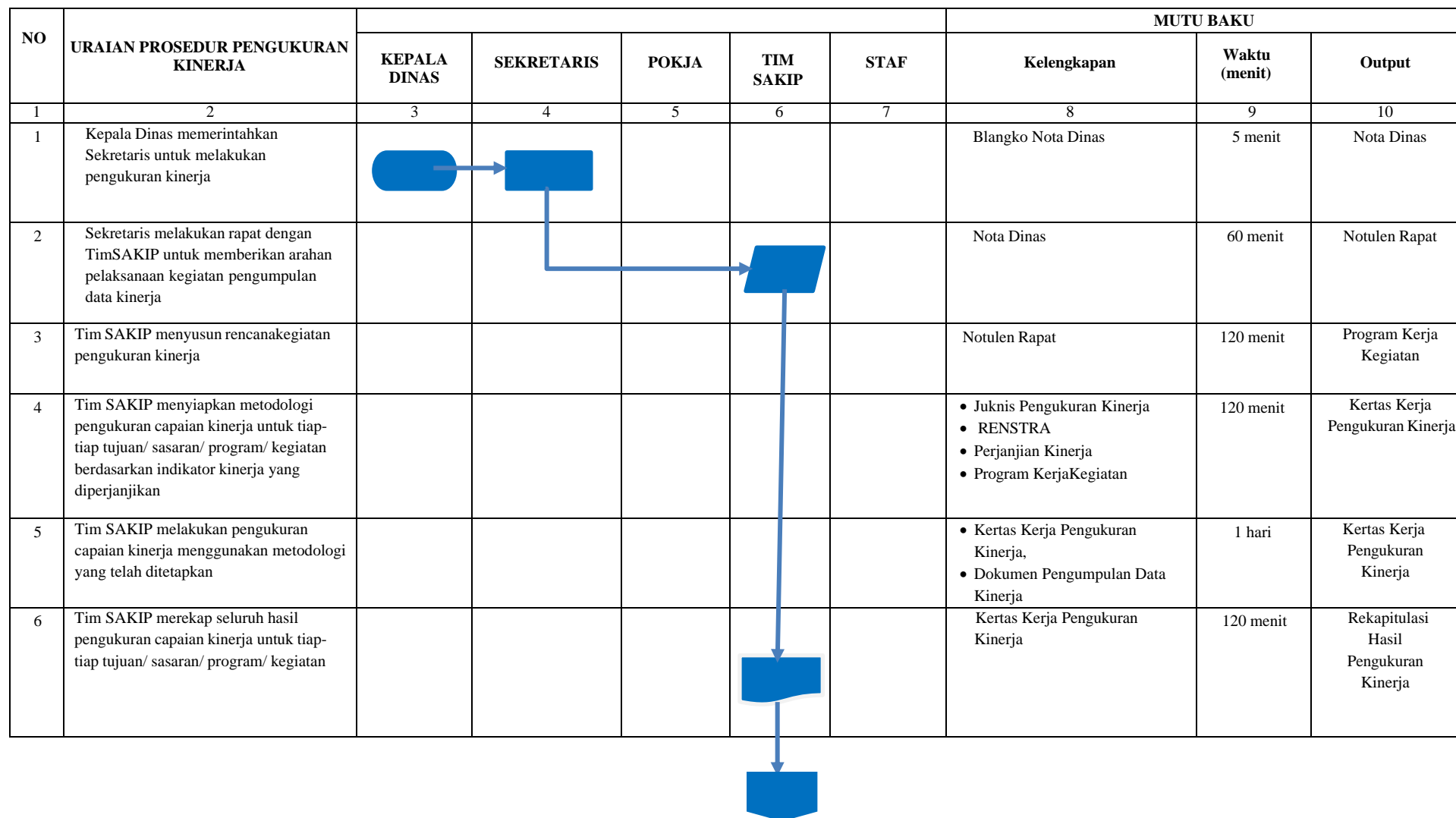
Akuntabilitas Kinerja merupakan wujud nyata organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan kepada pemberi mandat atas pelaksanaan kegiatan dan program dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu media pelaporan (LKIP). Penyusunan LKIP ini didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas rencana strategis.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

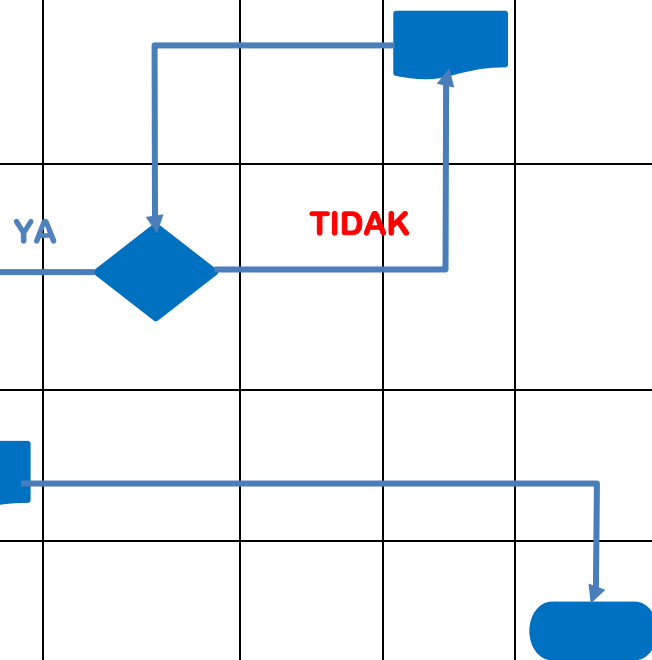
Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan target kinerja organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Dalam bab ini dijelaskan tentang capaian kinerja yang telah dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2024 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

Mekanisme pengumpulan data pengukuran kinerja yang digunakan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1 Mekanisme pengumpulan data pengukuran kinerja yang digunakan



NO	URAIAN PROSEDUR PENGUKURAN KINERJA						MUTU BAKU		
		KEPALA DINAS	SEKRETARIS	POKJA	TIM SAKIP	STAF	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Tim SAKIP melaporkan hasil rekapitulasi pengukuran kinerja kepada Sekretaris						Rekapitulasi Hasil Pengumpulan Data Kinerja	30 menit	Draft Laporan Hasil Pengukuran Data Kinerja
8	Sekretaris menganalisa hasil rekapitulasi pengukuran kinerja, apabila setuju akan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan Laporan kinerja dan evaluasi. Jika tidak maka dikembalikan untuk dilengkapi sesuai arahan.						Draft Laporan Hasil Pengukuran Data Kinerja	90 menit	Laporan Hasil Pengukuran Kinerja, Lembar Disposisi
9	Sekretaris dan Tim SAKIP melaporkan data pengukuran kinerja kepada Kepala Dinas						Laporan Hasil Pengukuran Kinerja, Lembar Disposisi	30 menit	Disposisi kepala Dinas
10							Arsip Hasil Pengumpulan Data Kinerja		



Adapun metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah dengan membandingkan rencana dan realisasi berikut , apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja. Formula pengukuran kinerja dengan membandingkan rencana dan realisasi menggunakan penghitungan sebagai berikut :

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcome* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran. Pengukuran ini bermanfaat untuk pembelajaran dan evaluasi atas kinerja, disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel 3.2 Skala Nilai Peringkat Kinerja.

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	85 – 100	Sangat Berhasil
2	70 ≤ 85	Berhasil
3	55 ≤ 70	Cukup Berhasil
4	≥ 55	Tidak Berhasil

Sedangkan Efisiensi merupakan pencapaian *output* yang maksimal dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang rendah untuk mencapai *output* tertentu. Pengukuran efisiensi kegiatan pada DPMPSTSP Kab. Kapuas Hulu dengan analisa efisiensi dan efektivitas. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output dan input untuk rencana maupun realisasi.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Input}}{\text{Realisasi Output}} \times 100\%$$

Adapun kategori efisiensi sebagai berikut :

- ▶ Efisien terjadi jika realisasi *input* lebih kecil dari realisasi *output*,
- ▶ Tidak efisien terjadi jika realisasi *input* lebih lebih besar dari *output* dan realisasi keluaran tidak sesuai dengan target,
- ▶ Efektif terjadi jika realisasi kegiatan lebih besar atau sama dengan target Tahun Anggaran 2024,
- ▶ Tidak efektif terjadi jika realisasi kegiatan lebih kecil dari target.

A. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran 1	Menciptakan Iklim Penanaman Modal yang kondusif dan berdaya saing
Indikator kinerja 1	Nilai Realisasi Investasi berdasarkan pemenuhan komitmen

Iklim investasi yang kondusif merupakan iklim dan berdaya saing dapat mendorong seseorang melakukan investasi dengan biaya dan risiko serendah mungkin, dan menghasilkan keuntungan jangka panjang yang tinggi. Ada sejumlah faktor yang

mempengaruhi iklim investasi, faktor-faktor tersebut tidak hanya menyangkut stabilitas politik dan sosial, tetapi juga stabilitas ekonomi, kondisi infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi dan prasarana jalan dan pelabuhan), berfungsinya sektor pembiayaan dan pasar tenaga kerja (termasuk isu-isu perburuhan), regulasi dan perpajakan, birokrasi (dalam waktu dan biaya yang diciptakan), masalah *good governance* termasuk korupsi, konsistensi dan kepastian dalam kebijakan pemerintah yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keuntungan netto atas biaya resiko jangka panjang dari kegiatan investasi, dan hak milik mulai dari tanah sampai kontrak.

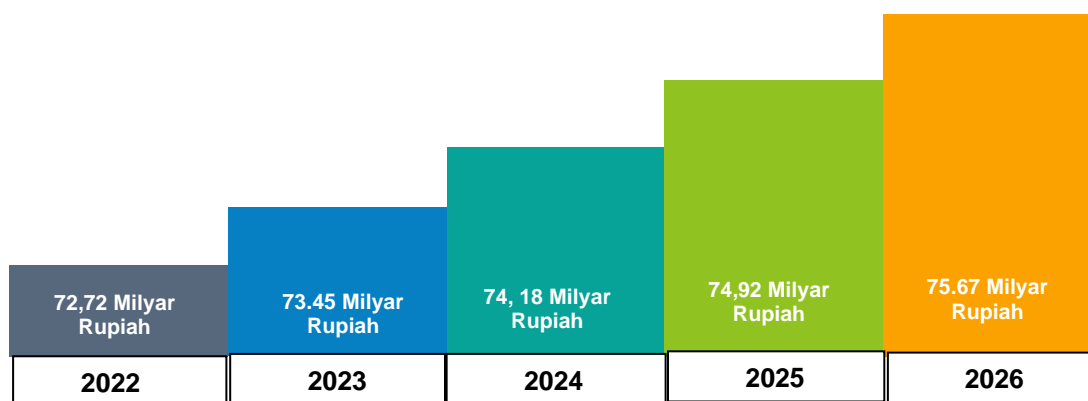
Salah satu upaya mewujudkan *good governance* adalah dengan diberlakukannya OSS (*Online Single Submission*). Sistem OSS ditujukan untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal berusaha, baik pelaku usaha perorangan maupun persekutuan agar dapat memulai bisnis di Indonesia. Jadi, pelaku usaha yang hendak memulai usahanya tidak perlu khawatir lagi usahanya terhambat karena perizinan usaha yang rumit dan berkepanjangan, karena segala pengurusan perizinan dapat dilakukan secara daring dan bebas biaya. Sedangkan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS (OSS RBA) adalah pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. OSS berbasis risiko ini diatur dalam peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik. Perbedaan dengan sistem OSS sebelumnya cukup sederhana, karena OSS RBA mengkategorikan kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021, tidak semua kegiatan usaha memerlukan izin usaha, karena penerapan perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha, yaitu usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Perizinan berusaha berbasis risiko dikategorikan menjadi 4 kategori, yaitu



sebagai berikut :

- Tingkat risiko rendah - maka perizinan berusaha yang digunakan adalah Nomor Induk Berusaha (NIB);
- Tingkat risiko menengah rendah - maka perizinan berusaha yang digunakan adalah NIB dan Sertifikat, yang berupa pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha;
- Tingkat risiko menengah tinggi - maka perizinan berusaha yang digunakan adalah NIB dan Sertifikat Standar yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing;
- Tingkat risiko tinggi - maka perizinan berusaha yang digunakan adalah NIB, Izin dan Sertifikat Standar.

Nilai realisasi investasi berdasarkan pemenuhan komitmen merupakan nilai realisasi investasi yang berasal dari pemenuhan komitmen pelaku usaha pada saat mendaftarkan kegiatan usahanya pada aplikasi OSS berbasis resiko (OSS RBA).



Gambar 3.1 Target Nilai Realisasi Berdasarkan Pemenuhan Komitmen 2021-2026

Adapun ringkasan penerbitan perizinan berusaha melalui OSS RBA dan nilai investasinya per sektor sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3 ringkasan penerbitan perizinan berusaha melalui OSS RBA dan nilai investasi per sektor tahun 2024

NO	SEKTOR	TOTAL JUMLAH	
		JUMLAH IZIN	NILAI INVESTASI
1	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	0	Rp -
2	Kementerian Kelautan dan Perikanan	268	Rp 43.480.781.001
3	Kementerian Kesehatan	34	Rp 5.304.000.000
4	Kemenerian Komunikasi dan Informasi	1	Rp 250.000.000
5	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	11	Rp 27.378.406.454
6	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2	Rp 300.000.000
7	Kementerian Pariwisata	212	Rp 33.525.460.000
8	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0	Rp -
9	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	12	Rp 201.000.000
10	Kementerian Perdagangan	839	Rp 72.541.379.930
11	Kementerian Perhubungan	7	Rp 835.000.000
12	Kementerian Perindustrian	288	Rp 12.949.345.900
13	Kementerian Pertanian	278	Rp 15.702.800.000
JUMLAH		1952	Rp 212.468.173.285

Jumlah perizinan berusaha yang terbit melalui OSS RBA berjumlah 1.952 dokumen, sedangkan izin pendirian bangunan (PBG) yang diterbitkan berjumlah 11 dokumen, dan non perizinan yang diterbitkan melalui SiCantik berjumlah 988 dokumen. Jadi total perizinan dan non perizinan diterbitkan di tahun 2024 berjumlah 2.951 dokumen. Jumlah dokumen non perizinan melalui SiCantik dan SIMBG sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.4 Jumlah Dokumen Non Perizinan Melalui SiCantik dan SIMBG

NO	JENIS IZIN	JUMLAH
1	SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER	71
2	SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN	324
3	SURAT IZIN PRAKTIK PERAWAT	359
4	SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI	20
5	SURAT IZIN KERJA TENAGA SANITARIAN	12
6	SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT	22
7	SURAT IZIN KERJA PEREKAM MEDIS	14
8	SURAT IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	25
9	SURAT IZIN PRAKTIK PENATA ANESTESI	0
10	SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER	26
11	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	26
12	SURAT IZIN PRAKTIK/KERJA FISIOTERAPIS	0
13	SURAT IZIN KERJA TENAGA RADIOGRAFER	2

NO	JENIS IZIN	JUMLAH
14	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	14
15	SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	2
16	SURAT IZIN KERJA REFRAKSIONIS OPTISIEN	0
17	SURAT IZIN PRAKTIK TEKNISI PELAYANAN	0
18	SURAT IZIN PRAKTIK INTERNSIP	21
19	SURAT IZIN PENYELENGGARAAN OPTIKAL	0
20	SURAT IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS	0
21	SURAT IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT	0
22	SURAT IZIN OPERASIONAL KLINIK	0
23	SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI JASA BOGA	1
24	IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	15
25	SURAT KETERANGAN PENELITIAN	4
26	PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG NON BERUSAHA	30
27	PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)	11
	JUMLAH	999

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Menciptakan Iklim Penanaman Modal yang kondusif dan berdaya saing dengan indikator kinerja 1 Nilai Realisasi Investasi berdasar pemenuhan komitmen terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja Sasaran 1 indikator 1.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Menciptakan Iklim Penanaman Modal yang kondusif dan berdaya saing	Nilai Realisasi Investasi berdasarkan pemenuhan komitmen	74,18 Milyar Rupiah	212,468 Milyar Rupiah	286,42

Nilai realisasi investasi berdasarkan pemenuhan komitmen diperoleh berdasarkan perizinan berusaha yang masuk dan divalidasi (memenuhi komitmen) melalui OSS RBA.

a) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dan tingkat efisiensi untuk mencapai sasaran

strategis 1 indikator 1 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6 Sumber Daya Dan Tingkat Efisiensi Untuk Mencapai Sasaran Strategis 1 Indikator 1

Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%		
Menciptakan Iklim Penanaman Modal yang kondusif dan berdaya saing	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	75.074.400	74.505.000	99,24	100%	0,76

Analisa dari tabel di atas adalah bahwa dengan penggunaan sumber daya / *input* sebesar 99,24% dapat dicapai realisasi kinerja / *output* sebesar 100%, artinya dalam mencapai realisasi kinerja telah efisien.

b) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mencapai sasaran strategis 1 indikator 1 yaitu nilai realisasi investasi berdasar pemenuhan komitmen, dimana indikator ini didukung oleh 1 Program yaitu Program Pelayanan Penanaman Modal yang terdiri dari 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan.

Tabel 3.7 Program & kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja

Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%		
Menciptakan Iklim Penanaman Modal yang kondusif dan berdaya saing	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	75.074.400	74.505.000	99,24	100%	0,76
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	75.074.400	74.505.000	99,24	100%	0,76
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	72.020.200	71.513.600	99,30	100%	0,70

Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%		
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	3.054.200	2.991.400	97,94	100%	2,06

Analisa dari tabel di atas, bahwa , dari 2 sub kegiatan tersebut mendukung pencapaian indikator kinerja nilai realisasi investasi berdasar pemenuhan komitmen melalui OSS RBA dengan efisien karena capaian kinerja/output lebih besar dari sumber daya/anggaran/input yang digunakan.

2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel realisasi kinerja tahun 2022, 2023 dan 2024 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.8 Tabel realisasi kinerja tahun 2022, 2023 dan 2024

Tahun	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
2022	Menciptakan Iklim Penanaman Modal yang kondusif dan berdaya saing	Nilai Realisasi Investasi berdasarkan pemenuhan komitmen	72,72 Milyar Rupiah	1,950 Milyar Rupiah	2681,5
2023	Menciptakan Iklim Penanaman Modal yang kondusif dan berdaya saing	Nilai Realisasi Investasi berdasarkan pemenuhan komitmen	73,45 Milyar Rupiah	397,029 Milyar Rupiah	540,54
2024	Menciptakan Iklim Penanaman Modal yang kondusif dan berdaya saing	Nilai Realisasi Investasi berdasarkan pemenuhan komitmen	74,18 Milyar Rupiah	212,468 Milyar Rupiah	286,42

Penggunaan OSS RBA masih terdapat kendala, karena merupakan aplikasi dari Kementerian Investasi/BKPM. Adapun kendala utamanya terletak pada pemenuhan komitmen dasar dan beberapa perubahan regulasi di Tingkat Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah yang masih perlu disesuaikan dengan persyaratan dalam OSS RBA. Meskipun masih jauh dari sempurna,

keberadaan sistem OSS RBA mendapat sambutan positif dari pelaku usaha yang menginginkan kemudahan dalam mendapatkan perizinan berusaha.

3. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra DPMPTSP

Perbandingan realisasi indikator realisasi kinerja tahun 2022, 2023 dan 2024 serta target akhir Renstra DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.9 Perbandingan realisasi indikator realisasi kinerja tahun dan target akhir Renstra

Sasaran Strategis	IKU	Realisasi			Target Akhir Renstra
		2022	2023	2024	
Menciptakan Iklim Penanaman Modal yang kondusif dan berdaya saing	Menciptakan Iklim Penanaman Modal yang Kondusif dan Berdaya Saing	1,950 Milyar Rupiah	397,029 Milyar Rupiah	212,468 Milyar Rupiah	75,67 Milyar Rupiah

Tren nilai realisasi investasi selama kurun waktu 2022 hingga 2024 cenderung mengalami penurunan. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti stabilitas politik dan sosial, stabilitas ekonomi, kondisi infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi dan prasarana jalan dan pelabuhan), berfungsinya sektor pembiayaan dan pasar tenaga kerja (termasuk isu-isu perburuhan), regulasi dan perpajakan, birokrasi (waktu dan biaya yang ditimbulkan), serta masalah *good governance* termasuk korupsi, konsistensi dan kepastian dalam kebijakan pemerintah. Namun, apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2026, nilai realisasi investasi telah jauh melebihi target yang ditetapkan.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun tantangan/hambatan dan upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi

permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

Tantangan/hambatan dalam pelaksanaan kegiatan :

- a) Perubahan regulasi di bidang penanaman modal yang begitu cepat, dan dinamis, sehingga daerah juga dituntut untuk segera dapat melakukan penyesuaian.
- b) Keterbatasan sumber daya yang dimiliki DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu dalam penyusunan regulasi bidang penanaman modal.
- c) Kendala sistem OSS RBA yang masih terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan sehingga menyebabkan sistem OSS RBA beberapa kali mengalami pemeliharaan dan pemindahan data.

Upaya yang dilakukan dalam menghadapi tantangan :

Dengan keterbatasan sumber daya yang ada, DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu tetap mengupayakan agar dapat tetap dapat memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan berusaha berbasis elektronik bidang penanaman modal dengan optimal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengikutsertakan aparatur yang membidangi pelayanan perizinan dan non perizinan untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Investasi / BKPM, baik secara *offline* maupun *online*. Namun, pendidikan dan pelatihan bidang pelayanan terpadu satu pintu masih terbatas.

Sasaran 1	Menciptakan Iklim Penanaman Modal yang kondusif dan berdaya saing
Indikator kinerja 2	Nilai Realisasi Investasi berdasarkan laporan penanaman modal

Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM, merupakan laporan perkembangan kegiatan usaha, baik yang belum berproduksi/operasi komersial maupun yang sudah, yang mencakup realisasi Penanaman Modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan dan kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal yang disampaikan oleh Pelaku Usaha baik orang perseorangan maupun badan usaha secara daring melalui subsistem Pengawasan pada sistem OSS. LKPM juga berguna untuk memberikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha serta sebagai referensi untuk pengajuan fasilitas penanaman modal. Dasar hukum penyampaian LKPM adalah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

LKPM merupakan bentuk kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Diharapkan melalui LKPM yang rutin dilaporkan oleh pelaku usaha, pemerintah bisa mendapatkan data yang valid untuk merumuskan kebijakan yang efektif guna memperbaiki iklim investasi dan kemudahan berusaha di daerah.

Untuk membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh daerah untuk mendanai program, kegiatan, dan kebijakan tertentu dengan tujuan mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan mendukung operasional layanan publik, maka dialokasikan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai

kegiatan fasilitasi penanaman modal yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Pasal 2 ayat (1) terdiri atas beberapa kegiatan, yaitu:

- a. pengawasan Penanaman Modal;
- b. bimbingan teknis kepada Pelaku Usaha;
- c. penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya; dan
- d. penyusunan bahan promosi Penanaman Modal (khusus DPMPTSP Provinsi).

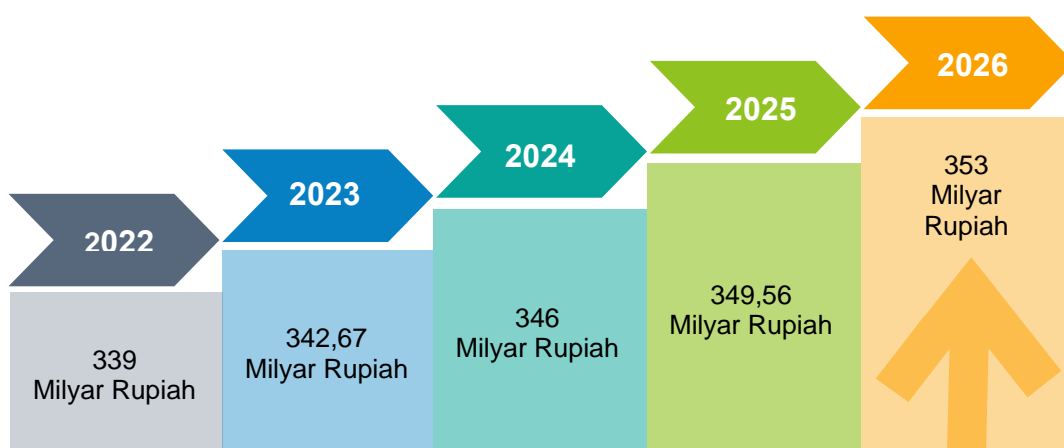
Besaran nilai alokasi DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024 yang diterima setiap tahunnya dipengaruhi oleh 4 (empat) indikator sebagaimana Pasal 7 ayat (2), yaitu :

- a. nilai realisasi Penanaman Modal akumulasi 3 (tiga) tahun terakhir;
- b. jumlah Pelaku Usaha akumulasi 3 (tiga) tahun terakhir;
- c. kapasitas fiskal daerah; dan
- d. kondisi aksesibilitas geografis.

Adapun pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana Pasal 13 Ayat (2) pada pelaksanaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal dilaksanakan oleh Kementerian dalam hal ini unit deputy yang menyelenggarakan urusan bidang pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dan unit deputy yang menyelenggarakan urusan bidang promosi Penanaman Modal dengan melibatkan Kementerian/Lembaga lain. Dengan ditetapkan Peraturan ini, diharapkan penggunaan DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024 dapat dimaksimalkan dengan baik dan dapat mencapai tujuan utama bersama.

Target yang ditetapkan untuk indikator nilai realisasi investasi berdasar laporan

kegiatan penanaman modal adalah sebagai berikut :



Gambar 3.2 Target Nilai Realisasi Investasi Berdasar LKPM

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Menciptakan Iklim Penanaman Modal yang kondusif dan berdaya saing dengan indikator kinerja 2 Nilai Realisasi Investasi berdasarkan laporan penanaman modal sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10 Pencapaian Kinerja Sasaran 1 indikator 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Menciptakan Iklim Penanaman Modal yang kondusif dan berdaya saing	Nilai Realisasi Investasi berdasarkan laporan penanaman modal	346 Milyar Rupiah	695,376 Milyar Rupiah	200,98

Nilai realisasi investasi berdasar LKPM pada tahun 2024 realisasi berdasarkan penghitungan sementara adalah sebesar Rp. 695,376 Milyar atau mencapai 200,98% dari target yang ditetapkan.

a) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dan tingkat efisiensi untuk mencapai sasaran strategis 1 indikator 2 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.11 Sumber Daya Dan Tingkat Efisiensi Untuk Mencapai Sasaran Strategis 1 Indikator 2

Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%		
Menciptakan Iklim Penanaman Modal yang kondusif dan berdaya saing	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	626.895.000	616.004.800	98,26	100%	1,74
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	626.895.000	616.004.800	98,26	100%	1,74
	Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merelaisasikan kegiatan usahanya	90.046.000	82.149.600	91,23	100%	8,77
	Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	330.173.000	327.563.400	99,21	100%	0,79
	Pengawasan penanaman modal	206.676.000	206.291.800	99,81	100%	0,19

Analisa dari tabel di atas, bahwa dari 1 (satu) program yang dilaksanakan DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu tahun 2024 jika dilihat dari realisasi kinerja, rata-rata capaian kinerja/output nya yaitu 100%, lebih besar dari realisasi sumber daya/anggaran/ input program capaiannya di atas 90%. Sehingga pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan efisien.

b) *Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja*

Untuk mencapai sasaran strategis 1 indikator 2 yaitu nilai realisasi investasi berdasar LKPM, dimana indikator ini didukung oleh 1 Program yaitu Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Tabel 3.12 kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%		
Menciptakan Iklim Penanaman Modal yang kondusif dan berdaya saing	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	626.895.000	616.004.800	98,26	100%	1,74
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	626.895.000	616.004.800	98,26	100%	1,74
	Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merelaisasikan kegiatan usahanya	90.046.000	82.149.600	91,23	100%	8,77
	Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	330.173.000	327.563.400	99,21	100%	0,79
	Pengawasan penanaman modal	206.676.000	206.291.800	99,81	100%	0,19

Analisa dari tabel di atas, bahwa dari 3 sub kegiatan yang mendukung pencapaian indikator nilai realisasi investasi berdasar LKPM, sebagian besar dapat mencapai target yang ditetapkan dengan rata-rata efisiensi 3,25.

2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel realisasi nilai realisasi investasi berdasarkan LKPM tahun 2022, 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13 realisasi nilai realisasi investasi berdasarkan LKPM tahun 2022, 2023 dan 2024

Tahun	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
2022	Menciptakan Iklim Penanaman Modal yang kondusif dan berdaya saing	Nilai Realisasi Investasi berdasarkan laporan penanaman modal	339 Milyar Rupiah	1.024.46 Milyar Rupiah	302
2023	Menciptakan Iklim Penanaman Modal yang kondusif dan berdaya saing	Nilai Realisasi Investasi berdasarkan laporan penanaman modal	342,67 Milyar Rupiah	1.007.098 Milyar Rupiah	293,90
2024	Menciptakan Iklim Penanaman Modal yang kondusif dan berdaya saing	Nilai Realisasi Investasi berdasarkan laporan penanaman modal	346 Milyar Rupiah	695,376 Milyar Rupiah	200,98

Sebagaimana nilai realisasi investasi berdasar pemenuhan komitmen, tren realisasi investasi berdasar laporan penanaman modal juga mengalami penurunan, meskipun jumlah pelaku usaha yang melaporkan perkembangan kegiatan usahanya semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena rata-rata pelaku usaha merupakan penanam modal jangka panjang seperti perkebunan kelapa sawit, yang membutuhkan waktu lama untuk merealisasikan kegiatan usahanya serta pengaruh faktor-faktor eksternal lainnya yang tidak dapat dikendalikan.

3. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Renstra DPMPTSP

Perbandingan realisasi indikator realisasi kinerja tahun 2022, 2023 dan 2024 serta target akhir Renstra DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.14 Perbandingan realisasi indikator realisasi kinerja tahun dan target akhir Renstra

Sasaran Strategis	IKU	Realisasi			Target Akhir Renstra
		2022	2023	2024	
Menciptakan Iklim Penanaman Modal yang kondusif dan berdaya saing	Menciptakan Iklim Penanaman Modal yang Kondusif dan Berdaya Saing	1.024.46 Milyar Rupiah	1.007.098 Milyar Rupiah	695,376 Milyar Rupiah	353 Milyar Rupiah

Tren nilai realisasi investasi tahun 2024 mengalami penurunan. Hal ini dipengaruhi tidak hanya menyangkut stabilitas politik dan sosial, tetapi juga stabilitas ekonomi, kondisi infrastruktur dasar (listrik, telekomunikasi dan prasarana jalan dan pelabuhan), berfungsinya sektor pembiayaan dan pasar tenaga kerja (termasuk isu-isu perburuhan), regulasi dan perpajakan, birokrasi (dalam waktu dan biaya yang ditimbulkan), serta masalah good governance termasuk korupsi, konsistensi dan kepastian dalam kebijakan pemerintah. Namun, apabila dibandingkan dengan target akhir periode Renstra tahun 2026, nilai realisasi investasi telah jauh melebihi target yang ditetapkan.

4. Membandingkan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan target Nasional 2024

Nilai realisasi investasi yang menjadi target Nasional berpedoman pada penghitungan nilai realisasi investasi berdasar LKPM, sehingga indikator ini bisa diperbandingkan dengan target Nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Investasi / BKPM.

Tabel 3.15 perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan target Nasional

Sasaran Strategis	IKU	Realisasi 2024	Target Nasional	Capaian
Menciptakan Iklim Penanaman Modal yang kondusif dan berdaya saing	Menciptakan Iklim Penanaman Modal yang Kondusif dan Berdaya Saing	695,376 Milyar Rupiah	582,63 Milyar Rupiah	119.351

Berdasarkan penghitungan sementara sampai dengan triwulan 4 yang diperoleh dari penyampaian LKPM melalui OSS RBA yang telah disetujui, nilai realisasi investasi Kab. Kapuas Hulu tahun 2024 telah mencapai 119,351 dari target Nasional yang ditetapkan.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam pelaksanaan pencapaian sasaran Menciptakan Iklim Penanaman Modal yang kondusif dan berdaya saing tentunya terdapat tantangan/kendala yang dihadapi, namun DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu berupaya untuk mencari solusi dalam menghadapi tantangan tersebut.

Tantangan/hambatan dalam pelaksanaan kegiatan :

- 1) Umumnya pelaku usaha masih mengalami kesulitan ketika diwajibkan untuk melaporkan perkembangan kegiatan usahanya, karena pada saat pembuatan nomor induk berusaha (NIB) mereka belum menyiapkan data kegiatan usahanya.
- 2) Selama kurun waktu 2019 (masa pandemi covid-19) hingga tahun 2024, DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu tidak dapat melaksanakan kegiatan promosi investasi karena ketiadaan anggaran yang cukup maupun data dan informasi penanaman modal yang dapat mendukung masuknya investor ke Kab. Kapuas Hulu.

Upaya yang dilakukan dalam menghadapi tantangan :

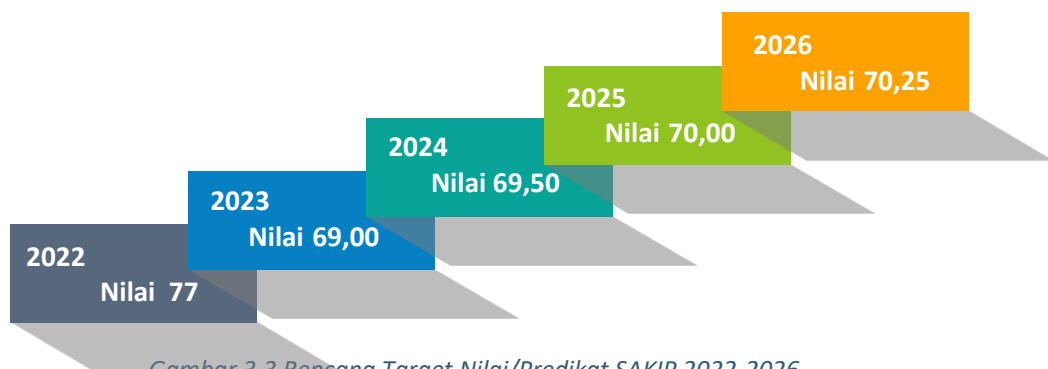
- 1) Melakukan pendampingan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mengisi dan melaporkan LKPM secara benar dan tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku.
- 2) Melakukan upaya pemberian informasi kepada investor dengan memanfaatkan

data dan informasi yang ada, namun hasilnya belum maksimal untuk menarik minat investor. Karena untuk menarik minat investor diperlukan komitmen *stakeholder* agar dapat melakukan pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targeted promotion*), terarah, dan inovatif, ketersediaan informasi tentang potensi dan peluang investasi yang informatif dan spesifik bagi para investor dan calon investor baik dari luar negeri maupun dalam negeri.

- 3) Meningkatkan kompetensi tenaga pendamping dan pelaksana pelayanan agar dapat memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan berusaha secara optimal.

Sasaran 2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP
Indikator kinerja	Nilai SAKIP

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Rencana kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Indikator Kinerja Utama Predikat SAKIP tahun 2022-2026 tergambar sebagai berikut :



Gambar 3.3 Rencana Target Nilai/Predikat SAKIP 2022-2026

Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 700.1.2.7/105/LHE/INKAB/IB-1 tanggal 21 Juni 2024 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebesar 69,26 dari 100 poin potensial yang dicapai dan termasuk kategori B (Baik), dimana akuntabilitas kinerja sudah baik, sudah memiliki dokumen perencanaan yang telah berorientasi hasil, dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Evaluasi SAKIP tahun 2023 dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal,. Adapun rincian hasil evaluasi per komponen penilaian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.16 rincian hasil evaluasi per komponen penilaian

NO	ASPEK	NILAI 2022	NILAI 2023
A.	PERENCANAAN KINERJA	23,10	23,10
B.	PENGUKURAN KINERJA	18,60	18,60
C.	PELAPORAN KINERJA	10,80	11,25
D.	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	16,75	16,75
	TOTAL	69,26	69,71

Berdasarkan kertas kerja evaluasi SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kapuas Hulu, berikut hal hal yang menjadi catatan tim evaluasi :



Hal - hal yang menjadi faktor positif :

1. Telah memiliki dokumen perencanaan kinerja secara lengkap dan cukup mencakup rencana strategis 2021-2026, rencana kerja, dan perjanjian kinerja dari para personil perangkat daerah juga disertai dokumen pendukung berupa pohon kinerja, dokumen *cascading*, dan dokumen *crosscutting* ;
2. Dokumen rencana strategis 2022-2026, rencana kerja, dan perjanjian kinerja sebagai dokumen perencanaan telah dipublikasikan;
3. Perencanaan kinerja telah memenuhi sebagian besar kualitas yang diharapkan, antara lain telah menetapkan rumusan hasil yang jelas, menetapkan indikator kinerja, dan menetapkan target *achievable*, dan realistis.
4. Dokumen perencanaan telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras dalam hal rumusan sasaran/tujuan, penggunaan indikator, serta penetapan target kinerja berdasarkan kondisi/hasil yang akan dicapai.

Tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan untuk perbaikan ke depan adalah :

Terhadap rekomendasi yang diberikan tersebut dan dalam rangka mengoptimalkan sistem pelaporan capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Kapuas Hulu , dirumuskan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

Tabel 3.17 Rencana Tindak Lanjut atas rekomendasi LHE SAKIP tahun 2023

NO.	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	PROGRESS	WAKTU PELAKSANAAN
1	Menguraikan secara jelas dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja	Akan dilakukan revisi terhadap dokumen rencana aksi tahun 2024	Dalam penyusunan	Triwulan 1 2025
2	Menetapkan target kinerja berbasis data yang relevan dalam perencanaan kinerja	Penetapan target kinerja (investasi) telah berbasis data yang relevan, namun realisasi kinerja (investasi) tidak dapat diprediksi	Dalam proses perbaikan	Triwulan 1 2025
3.	Melengkapi mekanisme pengumpulan data kinerja atau penetapan kinerja sumber data kinerja secara jelas dan dapat diandalkan	Akan dilakukan revisi terhadap pedoman pengumpulan dan pengukuran kinerja dengan sumber data yang jelas	Dalam proses perbaikan	Triwulan 1 2025
4.	Menggunakan teknologi informasi dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran pencapaian kinerja	Pengukuran kinerja telah menggunakan aplikasi e-sakip review hanya untuk fungsi cetak belum dapat digunakan	Selesai	Selesai
5.	Melakukan penilaian mandiri atas akuntabilitas kinerja internal perangkat daerah	Penilaian mandiri dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja setiap triwulan	Selesai	Selesai

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP dengan indikator kinerja nilai SAKIP DPMPTSP ditargetkan dengan nilai 69,50 terealisasi dengan nilai 69,71 sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.18 Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	Nilai SAKIP	69,50	69,71	100,30

Sasaran meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan indikator kinerja nilai SAKIP terealisasi dengan nilai 69,71 serta capaian sebesar 100,30%.

a) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dan tingkat efisiensi untuk mencapai sasaran strategis 2 dengan indikator nilai SAKIP adalah sebagai berikut :

Tabel 3.19 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Anggaran (Rp)			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPSTP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	3.103.526.300	2.980.904.874	96,05	100%	3,95
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.155.000	33.917.800	99,31	100%	0,69
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.755.000	16.676.300	99,53	100%	0,47
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	7.200.000	7.121.400	98,91	100%	1,09
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.200.000	10.120.100	99,22	100%	0,78
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.078.689.000	2.033.922.336	97,85	100%	2,15
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.907.099.000	1.862.492.736	97,66	100%	2,34
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	130.615.000	130.608.000	99,99	100%	0,01
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	25.075.000	24.998.900	99,70	100%	0,3
	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	6.700.000	6.693.900	99,91	100%	0,09
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.200.000	9.128.800	99,23	100%	0,77
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	54.050.000	53.972.100	99,86	100%	0,14
	Pakaian dinas beserta atributnya	27.680.000	27.680.000	100,00	100%	0

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Anggaran (Rp)			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%		
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.370.000	10.292.100	99,25	100%	0.75
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	16.000.000	16.000.000	100,00	100%	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	392.875.600	319.365.190	81,29	100%	18,29
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.242.000	6.242.000	100,00	100%	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.920.600	89.867.900	99,94	100%	0/06
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.239.000	26.238.500	100,00	100%	0
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.200.000	7.200.000	100,00	100%	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Daerah	250.784.000	177.338.240	70,71	90%	19.29
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12.490.000	12.478.550	99,91	100%	0.09
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.732.120	29.732.120	100,00	100%	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.732.120	29.732.120	100,00	100%	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	422.773.827	418.868.828	99,08	100%	0.92
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.037.868	57.567.288	94,31	100%	5,69
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	361.735.959	361.301.540	99,88	100%	0,12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.250.753	91.126.500	99,86	100%	0,14

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Anggaran (Rp)			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.730.753	66.606.500	99,81	100%	0,19
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.520.000	24.520.000	100,00	100%	0

Dari ke 7 (tujuh) kegiatan yang dilaksanakan pada Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/ Kota jika dilihat dari realisasi kinerja, rata-rata capaian kinerjanya yaitu sekitar 100%, sedangkan untuk realisasi keuangan semua program capaiannya di atas 90%. Salah satu penyebab realisasi keuangan tidak dapat terserap seluruhnya karena adanya selisih harga dengan harga pasar. Sedangkan capaian realisasi kinerja yang terendah pada sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Daerah yaitu 90% karena selama tahun 2024 terdapat beberapa kegiatan undangan yang tidak dapat diikuti karena bertepatan dengan kegiatan lain.

b) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mencapai sasaran strategis 2 dengan indikator kinerja nilai SAKIP, dimana untuk mencapai sasaran tersebut didukung 1 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota yang terdiri atas 7 kegiatan dan 22 sub kegiatan.

Tabel 3.20 Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Maupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Anggaran (Rp)			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	3.103.526.300	2.980.904.874	96,05	100%	3,95
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.155.000	33.917.800	99,31	100%	0,69
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.755.000	16.676.300	99,53	100%	0,47
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	7.200.000	7.121.400	98,91	100%	1,09
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.200.000	10.120.100	99,22	100%	0,78
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.078.689.000	2.033.922.336	97,85	100%	2,15
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.907.099.000	1.862.492.736	97,66	100%	2,34
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	130.615.000	130.608.000	99,99	100%	0,01
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	25.075.000	24.998.900	99,70	100%	0,3
	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	6.700.000	6.693.900	99,91	100%	0,09
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.200.000	9.128.800	99,23	100%	0,77
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	54.050.000	53.972.100	99,86	100%	0,14
	Pakaian dinas beserta atributnya	27.680.000	27.680.000	100,00	100%	0
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.370.000	10.292.100	99,25	100%	0,75

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Anggaran (Rp)			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	16.000.000	16.000.000	100,00	100%	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	392.875.600	319.365.190	81,29	100%	18,29
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.242.000	6.242.000	100,00	100%	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.920.600	89.867.900	99,94	100%	0/06
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	26.239.000	26.238.500	100,00	100%	0
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.200.000	7.200.000	100,00	100%	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Daerah	250.784.000	177.338.240	70,71	90%	19.29
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12.490.000	12.478.550	99,91	100%	0.09
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	29.732.120	29.732.120	100,00	100%	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.732.120	29.732.120	100,00	100%	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	422.773.827	418.868.828	99,08	100%	0.92
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.037.868	57.567.288	94,31	100%	5,69
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	361.735.959	361.301.540	99,88	100%	0,12
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91.250.753	91.126.500	99,86	100%	0,14

Sasaran Strategis	Program/Kegiatan/ Sub kegiatan	Anggaran (Rp)			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.730.753	66.606.500	99,81	100%	0,19
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.520.000	24.520.000	100,00	100%	0

Dari 22 sub kegiatan yang telah dilaksanakan rata-rata capaian kinerjanya adalah 100% atau dapat dilaksanakan dan dapat mencapai indikator kinerjanya. Namun dari sisi anggaran terdapat beberapa sub kegiatan yang serapan anggarannya dibawah 90%, yaitu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Daerah yaitu 90% karena selama tahun 2024 terdapat beberapa kegiatan undangan yang tidak dapat diikuti karena bertepatan dengan kegiatan lain yang lebih prioritas.

2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel realisasi nilai SAKIP tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.21 Realisasi Nilai SAKIP Tahun 2023 dan 2024

Tahun	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
2023	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	Nilai SAKIP	69,00	69,26	100,38
2024	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	Nilai SAKIP	69,50	69,71	100,30

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa hasil evaluasi SAKIP tahun 2023 tidak dapat diperbandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena adanya

perbedaan bobot, komponen serta kriteria penilaiannya, sehingga tabel di atas hanya membandingkan capaian tahun 2023 dan 2024. Secara nilai keseluruhan terdapat kenaikan nilai 0,45 yaitu pada aspek pelaporan kinerja,

3. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir dalam dokumen Renstra

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target jangka menengah sebagaimana yang tertuang dalam dokumen perubahan Renstra 2021-2026 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.22 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Akhir Dalam Dokumen Renstra

Sasaran Strategis	IKU	Realisasi		Target Akhir Renstra
		2023	2024	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	69,26	69.71	70,25

Tabel di atas menunjukkan target akhir yang terdapat dalam dokumen perubahan Renstra di akhir periode tahun 2026. DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu dari tahun ke tahun berupaya untuk terus memperbaiki akuntabilitasnya, dengan melengkapi dokumen perencanaan, melakukan penyelarasan serta melakukan tindak lanjut sebagaimana rekomendasi hasil reviu terhadap akuntabilitas DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu pada tahun sebelumnya. Pencapaian ini diharapkan dapat terus ditingkatkan.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Hal-hal yang menjadi tantangan dan upaya untuk menghadapi tantangan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan :

Tantangan dalam pencapaian sasaran antara lain :

1. Konsistensi dan keselarasan antar dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja yang digunakan.
2. Keterbatasan sumber daya aparatur yang ada dan masih terbatasnya bimbingan teknis tentang SAKIP, penyusunan dokumen perencanaan maupun pelaporan kinerja.

Upaya tindak lanjut dalam menghadapi tantangan, antara lain :

- a). Mengoptimalkan sumber daya yang ada, untuk saling mengingatkan dan melengkapi kekurangselarasan antar tiap dokumen sehingga menghasilkan dokumen perencanaan yang selaras.
- b). Berupaya untuk mengikutsertakan aparatur yang menangani dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan evaluasi untuk mengikuti bimbingan teknis tentang SAKIP.

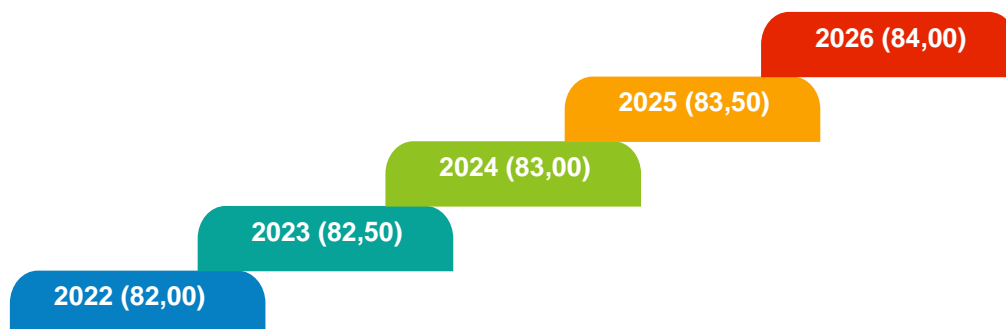
Sasaran 3	Meningkatkan kualitas pelayanan publik DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu
Indikator Kinerja	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Survei ini berguna untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.

Rencana kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kapuas Hulu dengan



indikator kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2021-2026 tergambar sebagai berikut :



Gambar 3.4 Rencana Target Nilai SKM 2021-2026

Metode yang digunakan dalam melakukan survei adalah dengan memberikan kuisioner pada responden, yang merupakan pelaku usaha atau masyarakat yang datang langsung ke DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu maupun melalui media layanan publik DPMPTSP lainnya, mengenai pelayanan perizinan dan non perizinan berusaha yang mereka terima. Hasil survei tersebut kemudian diolah sehingga menghasilkan nilai SKM. Hasil pengukuran SKM tahun 2024 yang dilakukan pada 176 responden :

Tabel 3.23 Hasil Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2024

No.	Unsur pelayanan	Nilai rata-rata
1	Persyaratan	3,59
2	Prosedur	3,49
3	Waktu Pelayanan	3,24
4	Biaya/tarif	4,00
5	Produk Layanan	3,51
6	Kompetensi Pelaksana	3,55
7	Perilaku Pelaksana	3,59
8	Sarana dan Prasarana	3,51
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,89
Rata-rata		3,59
Nilai SKM		89,82

Tabel diatas menunjukkan nilai SKM dengan mutu pelayanan “A” dan kinerja unit pelayanan “Sangat Baik” yang artinya tingkat Kepuasan Pelayanan pada DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kategori “Sangat Baik”.

Jika dilihat dari hasil pengukuran, untuk NRR (Nilai Rata-rata) per unsur yang memiliki nilai tertinggi yaitu unsur biaya/tarif yaitu 4,00. Unsur penilaian biaya/tarif dikategorikan ‘SANGAT BAIK’ atau nilainya A, disebabkan layanan yang diberikan kepada seluruh pemohon adalah tidak dikenakan biaya atau tarif Rp. 0,- sehingga masyarakat penerima jasa layanan merasa puas dan tidak terbebani dengan biaya pelayanan.

Sedangkan unsur dengan Nilai Rata-Rata terendah adalah waktu pelayanan yaitu 3,24. Hal ini disebabkan karena beberapa waktu lalu terjadi beberapa kali pemeliharaan maupun pembaruan terhadap aplikasi OSS RBA maupun SiCantik sehingga berdampak terhadap pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan berusaha. Namun, DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu tetap berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelaku usaha.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024

Target dan realisasi kinerja sasaran 3 Meningkatkan Kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu dengan indikator nilai SKM ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 3.24 Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik DPMPTSP Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatkan Kualitas pelayanan publik DPMPTSP	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	83,00	89,82	108,22

Di tahun 2024 ini DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu berhasil memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan (Renstra) yaitu nilai SKM 83,00 (Baik) dan terealisasi dengan nilai SKM 89,82 (Sangat Baik), dengan capaian kinerja sebesar 108,22%.

a) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dan tingkat efisiensi untuk mencapai sasaran strategis 3 dengan indikator nilai SKM adalah sebagai berikut :

Tabel 3.25 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%		
Meningkatkan Kualitas pelayanan publik DPMPTSP	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	35.080.000	34.977.300	99,71	100%	0.29
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.080.000	34.977.300	99,71	100%	0.29
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	35.080.000	34.977.300	99,71	100%	0.29

Dari ke 6 (enam) program yang dilaksanakan DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu tahun 2024 jika dilihat dari realisasi kinerja, capaian kinerjanya yaitu 100%, sedangkan untuk realisasi keuangan capaiannya di atas 99,71%. Sehingga kinerja termasuk efisien dimana capaian kinerja / *output* lebih besar daripada sumber daya / *inputnya*,

b) Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Untuk mencapai sasaran strategis 3 dengan indikator kinerja nilai SKM, dimana untuk mencapai sasaran tersebut didukung 1 Program yaitu Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang terdiri atas 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan.

Tabel 3.26 Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Maupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%		
Meningkatkan Kualitas pelayanan publik DPMPTSP	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	35.080.000	34.977.300	99,71	100%	0.29
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.080.000	34.977.300	99,71	100%	0.29
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	35.080.000	34.977.300	99,71	100%	0.29

Dari program yang mendukung tersebut dapat dilihat bahwa capaian kinerjanya 100% dengan penyerapan anggaran sebesar 99,71%, sehingga tingkat efisiensinya 0,29.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya

Perbandingan antara realisasi kinerja sasaran meningkatkan kualitas pelayanan publik pada DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.27 Analisis Realisasi Kinerja Dan Capaian Kerja Tahun 2024 Dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
2022	Meningkatnya kualitas Pelayanan publik DPMPTSP	Nilai SKM	82,00	85,69	104,5
2023	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik DPMPTSP	Nilai SKM	82,50	87,38	105, 9
2024	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik DPMPTSP	Nilai SKM	83,00	89,82	108,22

Selama kurun waktu 2022 hingga 2024 kualitas pelayanan publik yang ditunjukkan dengan nilai SKM aadalah rata-rata baik dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Diharapkan DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu dapat selalu memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan berusaha yang terbaik kepada pelaku usaha dan Masyarakat.

3. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir dalam dokumen Renstra

Perbandingan realisasi kinerja sasaran meningkatkan kualitas pelayanan publik pada DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu terhadap target akhir periode Renstra diperlihatkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.28 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Target Akhir Dalam Dokumen Renstra

Sasaran Strategis	IKU	Realisasi			Target Akhir Renstra
		2022	2023	2024	
Meningkatkan Kualitas pelayanan publik DPMPTSP	Meningkatkan Kualitas pelayanan publik DPMPTSP	85,69	87,38	89,82	84,00

Realisasi nilai survei kepuasan masyarakat di tahun 2024 sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas, telah melampaui target akhir Renstra. Hal ini menunjukkan

bahwa DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu terus menerus berupaya memperbaiki kualitas layanan yang diberikan sehingga masyarakat merasa puas dengan layanan yang diterima.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dari hasil pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu secara umum menggambarkan bahwa pelayanan publik dinilai BAIK namun demikian bukan berarti tidak ditemukan kendala.

Tantangan dalam pencapaian sasaran_:

1. Dilihat dari sumber daya manusia, kelemahan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik berkaitan dengan profesionalisme, kompetensi, empati, dan etika aparatur yang membidangi pelayanan.
2. Sementara jika dilihat dari sisi manajemen kelembagaan, kelemahan utama terletak pada desain organisasi yang tidak dirancang khusus dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat penuh dengan hierarki yang membuat pelayanan menjadi berbelit-belit (birokratis), dan tidak terkoordinasi.

Upaya tindak lanjut dalam menghadapi tantangan dalam mencapai sasaran :

1. Memperbaiki standar operasional prosedur (SOP) pelayanan pengaduan dan konsultasi agar setiap layanan pengaduan dan konsultasi dapat terlayani dan mendapat tindak lanjut yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.
2. DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu berupaya untuk mengikutsertakan aparatur yang menangani pelayanan dalam bimbingan dan pelatihan teknis tentang pelayanan perizinan bidang penanaman modal.

3. Meningkatkan pelayanan terpadu satu pintu merupakan komitmen *stakeholder* dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik karena akan melibatkan beberapa perangkat dinas teknis terkait yang telah melimpahkan kewenangan penerbitan izinnya pada DPMPTSP.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada bagian ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, yaitu melaksanakan fungsi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan serta fungsi penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman modal sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu pada tahun anggaran 2024 melaksanakan 6 (enam) program yang terdiri dari 12 (dua belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan termasuk kegiatan non teknis (kesekretariatan). Rata-rata realisasi fisik berdasarkan indikator kinerja kegiatannya mencapai 100% untuk seluruh kegiatan, sedangkan realisasi anggaran mencapai 96,51%.

Tabel 3.29 Realisasi Kinerja Dan Anggaran Per Sasaran Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Menciptakan Iklim Penanaman Modal yang Kondusif dan Berdaya Saing	1. Nilai Realisasi Investasi berdasarkan pemenuhan komitmen	74,18 Milyar Rupiah	212,47 Milyar Rupiah	286,42	75.074.400	74.505.000	99,24
	2. Nilai Realisasi Investasi berdasarkan laporan penanaman modal	346 Milyar Rupiah	695,376 Milyar Rupiah	200,98	680.313.000	667.880.700	98,17

Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	Nilai SAKIP	69,50	69,71	100,30	3.103.526.300	2.980.904.874	97,49
Meningkatkan Kualitas pelayanan publik DPMPTSP	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	83,00	89,82	108,22	35.080.000	34.977.300	99,71
Rata-rata /Jumlah				173,98	3.893.993.700	3.758.267.874	96,51

Sasaran yang mendapat alokasi dana terbesar adalah sasaran 2 yaitu meningkatkan akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu, selanjutnya adalah sasaran 1 yaitu menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan berdaya saing, dan terakhir adalah sasaran 3 yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik DPMPTSP. Hal ini dikarenakan dalam alokasi anggaran sasaran meningkatkan akuntabilitas kinerja DPMPTSP terdapat program dan kegiatan yang merupakan anggaran operasional rutin kantor yang harus ada setiap tahunnya dan sebagai penunjang utama bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk terwujudnya pelayanan yang baik dan berkualitas

Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu berhasil merealisasikan seluruh target kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan atau rata-rata capaian kinerja sebesar 173,98%, sedangkan pada aspek anggaran (*input*) yang dibelanjakan mencapai 96,51%. Dengan demikian, capaian hasil / *output* masih lebih besar dari inputnya dan termasuk dalam kategori efisien.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai masing-masing program/kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis termasuk penggunaan dana DAK non fisik fasilitasi penanaman modal disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.30 Realisasi Belanja Langsung Tahun 2024

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	Sumber Dana
1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16.755.000	16.676.300	99,53	DAU
		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	7.200.000	7.121.400	98,91	DAU
		3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.200.000	10.120.100	99,22	DAU
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.907.099.000	1.862.492.736	97,66	DAU
		2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	130.615.000	130.608.000	99,99	DAU
		3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	25.075.000	24.998.900	99,70	DAU
		4 Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	6.700.000	6.693.900	99,91	DAU
		5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.200.000	9.128.800	99,23	DAU
	4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Pakaian dinas beserta atributnya	27.680.000	27.680.000	100,00	DAU
		2 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10.370.000	10.292.100	99,25	DAU
		3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	16.000.000	16.000.000	100,00	DAU
	5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.242.000	6.242.000	100,00	DAU
		2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	89.920.600	89.867.900	99,94	DAU
		3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.239.000	26.238.500	100,00	DAU
		4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.200.000	7.200.000	100,00	DAU

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	Sumber Dana
		5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Daerah	250.784.000	177.338.240	70,71	DAU
		6 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12.490.000	12.478.550	99,91	DAU
	6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.732.120	29.732.120	100,00	DAU
	7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.037.868	57.567.288	94,31	DAU
		2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	361.735.959	361.301.540	99,88	DAU
	8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	66.730.753	66.606.500	99,81	DAU
		2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.520.000	24.520.000	100,00	DAU
1 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	1 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	27.590.000	26.721.200	96,85	DAU
2 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	25.828.000	25.154.700	97,39	DAU
3 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1 Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	72.020.200	71.513.600	99,30	DAU
		2 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	3.054.200	2.991.400	97,94	DAU

PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	Sumber Dana
4 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merelaisasikan kegiatan usahanya	90.046.000	82.149.600	91,23	DAK
		2 Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	330.173.000	327.563.400	99,21	DAK
		3 Pengawasan penanaman modal	206.676.000	206.291.800	99,81	DAK / DAU
1 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	35.080.000	34.977.300	99,71	DAU
JUMLAH			3.864.261.580	3.758.267.874	96,51	

Sebagaimana disajikan pada tabel di atas, penyerapan anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 3.758.267.874,00 dari pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp. 3.893.993.700,00, termasuk di dalamnya merupakan gaji dan tunjangan ASN dan dana DAK non fisik fasilitasi penanaman modal. Capaian penyerapan sebesar 96,51% atau 100,54% dari target penyerapan anggaran tahun 2024 yaitu 96%.

Total belanja operasi adalah sebesar Rp 1.895.775.138,00 atau 48,68% dari total pagu anggaran DPMPSTSP Kab. Kapuas Hulu, termasuk dana DAK non fisik fasilitasi penanaman modal sebesar Rp. 680.313.000,00, yang artinya menyisakan Rp. 1.215.462.138,00,00 untuk melaksanakan seluruh program/kegiatan yang telah ditetapkan.

Rincian penggunaan anggaran per program per kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub-sub kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, anggaran sebesar Rp. 16.755.000,- dan terealisasi Rp. 16.676.300,- atau sebesar 99,53%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan computer, belanja makanan dan minuman rapat.
- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, anggaran sebesar Rp. 7.200.000,- dan terealisasi Rp. 7.121.400,- atau 98,91%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer, dan belanja makanan dan minuman rapat.
- Evaluasi kinerja perangkat daerah, anggaran sebesar Rp. 10.200.000,- dan terealisasi Rp. 10.120.100,- atau 99,22%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer, belanja makanan dan minuman rapat, dan belanja jasa tenaga operator computer.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub-sub kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, anggaran tersedia sebesar Rp. 1.907.099.000,- dan terealisasi Rp. 1.862.492.736,- atau 97,66%. Dana tersebut digunakan untuk belanja gaji pokok PNS, belanja gaji pokok PPPK,

belanja tunjangan keluarga PNS, belanja tunjangan keluarga PPPK, belanja tunjangan jabatan PNS, belanja tunjangan fungsional PNS, belanja tunjangan fungsional umum PNS, belanja tunjangan fungsional umum PPPK, belanja tunjangan beras PNS, belanja tunjangan beras PPPK, belanja tunjangan pph/tunjangan khusus PNS, belanja pembulatan gaji PNS, belanja pembulatan gaji PPPK, belanja iuran jaminan kesehatan PNS, belanja iuran jaminan kesehatan PPPK, belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS, belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK, belanja iuran jaminan kematian PNS, belanja iuran jaminan kematian PPPK, belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS, dan belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK.

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, anggaran tersedia sebesar Rp. 130.615.000,- dan terealisasi Rp. 130.608.000,- atau 99,99%. Dana tersebut digunakan untuk belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan, belanja honorarium pengadaan barang/jasa, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, serta belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer.
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, anggaran tersedia Rp. 25.075.000,- dan terealisasi Rp 24.998.900,- atau 99,70%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer, belanja makanan dan minuman rapat, serta untuk belanja jasa tenaga operator komputer.
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, anggaran sebesar Rp. 6.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp 6.693.900,-

atau 99,91%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer, belanja makanan dan minuman rapat.

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, anggaran sebesar Rp. 9.200.000,- dan terealisasi Rp. 9.128.800,- atau 99,23%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer, belanja makanan dan minuman rapat.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub-sub kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Pakaian dinas beserta atributnya dengan anggaran sebesar Rp. 27.680.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 27.680.000,- atau 100%. Dana tersebut digunakan untuk penyediaan pakaian dinas dan atributnya bagi seluruh aparatur DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu.
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, anggaran sebesar Rp. 10.370.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 10.292.100,- atau 99,25%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer, serta belanja jasa tenaga operator komputer.
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsinya, anggaran sebesar Rp. 16.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.

16.000.000,- atau 100%. Dana tersebut digunakan untuk belanja kursus singkat/pelatihan.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub-sub kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, anggaran sebesar Rp. 6.242.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.242.000,- atau 100%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik.
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, anggaran sebesar Rp. 89.920.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 89.867.900,- atau 99,94%. Dana tersebut digunakan untuk belanja bahan-isi tabung pemadam kebakaran, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-benda pos, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya.
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, anggaran sebesar Rp. 26.239.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 26.239.000,- atau 100%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, anggaran sebesar Rp. 7.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp 7.200.000,- atau 100%. Dana tersebut digunakan untuk belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, anggaran sebesar Rp. 250.784.000,- dan terealisasi sebesar Rp 177.338.240,- atau



70,71%. Dana tersebut digunakan untuk belanja perjalanan dinas biasa, serta belanja perjalanan dinas dalam kota.

- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, anggaran sebesar Rp. 12.490.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.478.550,- atau 99,91%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, dan belanja jasa tenaga arsip dan perpustakaan.

e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub-sub kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, anggaran sebesar Rp. 29.732.120,- dan terealisasi sebesar Rp. 29.732.120,- atau 100%. Dana tersebut digunakan untuk belanja modal alat pendingin.

f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub-sub kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik, anggaran tersedia sebesar Rp. 61.037.868,- dan terealisasi sebesar Rp. 57.567.288,- atau 94,31%. Dana tersebut digunakan untuk belanja tagihan telepon, belanja tagihan air, belanja tagihan listrik, serta belanja kawat/faksimili/internet/tv berlangganan.
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, anggaran tersedia sebesar Rp. 361.735.959,- dan terealisasi sebesar Rp. 361.301.540,- atau 99,88%. Dana tersebut digunakan untuk belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan, belanja jasa tenaga administrasi, belanja jasa tenaga keamanan, belanja iuran jaminan kesehatan bagi non ASN, belanja iuran jaminan

kecelakaan kerja bagi non ASN, dan belanja iuran jaminan kematian bagi non ASN.

g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub-sub kegiatan sebagaimana tersebut di bawah ini :

- Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, anggaran tersedia sebesar Rp. 66.730.753,- dan terealisasi sebesar Rp. 66.606.500,- atau 99,81%. Dana tersebut digunakan untuk belanja bahan-bahan bakar dan pelumas, belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan, belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan dinas bermotor perorangan, serta belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor-kendaraan bermotor penumpang.
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, anggaran tersedia sebesar Rp. 24.520.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.520.000,- atau 100%. Dana tersebut digunakan untuk belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin, belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal komputer, belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal :

➤ Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten /Kota dengan sub-sub kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota, anggaran tersedia sebesar Rp. 27.590.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 26.721.200,- atau 96,85%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan

komputer, belanja makanan dan minuman rapat serta belanja perjalanan dinas biasa.

3. Program Promosi Penanaman Modal :

- Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub-sub kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini :
 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota, anggaran sebesar Rp. 25.828.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 25.154.700,- atau 97,39%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer, belanja makanan dan minuman rapat, belanja perjalanan dinas biasa, serta belanja perjalanan dinas dalam kota.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal :

- Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten /Kota, dengan sub-sub kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini :
 - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, anggaran tersedia sebesar Rp. 72.020.200,- dan terealisasi sebesar Rp. 71.513.600,- atau 99,30%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer, belanja makanan dan minuman rapat, belanja jasa tenaga operator komputer, serta belanja perjalanan dinas dalam kota.

- Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal, anggaran tersedia sebesar Rp. 3.054.200,- dan terealisasi sebesar Rp 2.991.400,- atau 97,94%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer serta belanja perjalanan dinas dalam kota.

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal :

- Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub-sub kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini :
 - Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merelaisasikan kegiatan usahanya, anggaran sebesar Rp. 90.046.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 82.149.600,- atau 91,23%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer, serta belanja perjalanan dinas biasa.
 - Bimbingan teknis kepada pelaku usaha, anggaran sebesar Rp. 330.173.000,- dan terealisasi Rp. 327.563.400,- atau 99,21%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja makanan dan minuman rapat, honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara, dan panitia, belanja jasa tenaga administrasi, belanja sewa alat angkutan darat bermotor lainnya, belanja perjalanan dinas dalam kota, serta belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota.

- Pengawasan penanaman modal, anggaran sebesar Rp. 206.676.000,- dan terealisasi Rp. 206.291.800,- atau 99,81%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja makanan dan minuman rapat, belanja sewa alat angkutan darat bermotor lainnya, serta belanja perjalanan dinas dalam kota.

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal :

➤ Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub-sub kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, anggaran tersedia sebesar Rp. 35.080.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 34.977.300,- atau 99,71%. Dana tersebut digunakan untuk belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-bahan komputer, belanja jasa tenaga operator computer, serta belanja perjalanan dinas dalam kota.

C. INOVASI

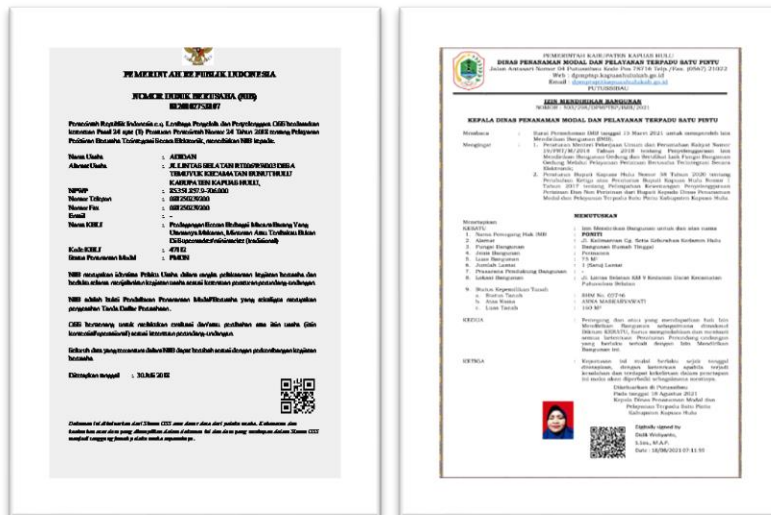
DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu telah melakukan beberapa inovasi pelayanan perizinan berusaha terhadap masyarakat, yaitu :

1) Tanda tangan digital (*digital signature*)

Tanda tangan digital digunakan dalam penandatanganan dokumen perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu. Tanda tangan digital ini membantu kinerja DPMPTSP menjadi lebih ringan dan cepat. Kepala dinas tidak perlu lagi



melakukan penandatanganan dokumen secara manual dalam jumlah besar, karena dengan tanda tangan digital, penandatanganan dokumen perizinan dapat dilakukan dengan mudah melalui komputer atau telepon genggam pintar selama 24 jam dari berbagai tempat, sehingga dapat mempercepat proses pelayanan perizinan. Selain itu juga, adanya tanda tangan digital mencegah terjadinya pemalsuan tanda tangan dan dokumen perizinan karena menggunakan *Quick Response Code* (QR code).



Gambar 3.5 Dokumen Perizinan yang menggunakan QR Code

2) Pelayanan Bergerak ke Kecamatan (Pengaban)

Pelayanan bergerak dimaksudkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan berusaha di Kabupaten Kapuas Hulu, khususnya kepada Pelaku Usaha yang belum memiliki izin usaha di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang jarak tempuhnya cukup jauh dari Ibukota Kabupaten. Kegiatan ini dilakukan dalam upaya mempermudah pelaku usaha untuk memperoleh legalitas perizinan berusaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Dalam pelaksanaannya DPMPSTSP Kab. Kapuas Hulu bekerjasama dengan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) guna memfasilitasi pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi pelaku usaha atau masyarakat yang belum memiliki NPWP atau mengaktifkan kembali NPWP yang bermasalah.

Dengan demikian akan memudahkan pemohon dalam mengurus izin usahanya.



Gambar 3.6 Pelayanan Bergerak DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu

BAB IV

PENUTUP

LKIP menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKIP menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKIP bagi DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu memiliki makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu, dan juga menjadi bagian dari pertanggung-jawaban tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu terhadap Bupati maupun kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu.

A. KESIMPULAN

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang valid dan andal, bukan hanya pencapaian tahun pelaporan, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu pada tahun 2024 adalah sangat baik, karena hampir seluruh indikator kinerja telah terealisasi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam

pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis khususnya dalam Renstra dan Renja tahun 2024, yang mencakup juga penentuan program / kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program / kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga program teknis yang mendukung pencapaian IKU.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu ke depan, yaitu :

- 1) Perlu memperbaharui aturan pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu bidang penanaman modal, yang akan diselesaikan pada tahun 2025 mendatang.
- 2) Belum maksimalnya pembinaan terhadap pelaku usaha di Kabupaten Kapuas Hulu sehingga kesadaran pelaku usaha untuk menyampaikan LKPM meningkat, melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap proyek investasi sehingga nilai realisasi investasi di Kabupaten Kapuas Hulu mengalami peningkatan.
- 3) Belum optimalnya kegiatan pelayanan perizinan berusaha . Walaupun pelayanan perizinan berusaha telah beralih ke sistem pelayanan perizinan secara *online* terintegrasi secara elektronik berbasis resiko (OSS RBA) dan SiCantik, namun masih banyak masyarakat pelaku usaha yang belum dapat mengakses aplikasi tersebut sehingga diperlukan suatu gerakan agar memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan perizinan berusaha.
- 4) Belum optimalnya kegiatan promosi investasi daerah. Dalam hal ini perlu untuk menyusun dokumen profil investasi dan peluang investasi melalui kajian kelayakan sehingga memudahkan investor untuk membuat pilihan dan kebijakan

dalam berinvestasi di Kabupaten Kapuas Hulu.

- 5) Terbatasnya alokasi anggaran belanja DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu, sehingga beberapa kegiatan prioritas tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Adapun faktor pendukung yang menjadi kekuatan dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah :

- a). Pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang kegiatan pelayanan perizinan berusaha, sehingga proses pelayanan perizinan berusaha menjadi lebih efisien, efektif dan transparan serta memberi kemudahan bagi pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mendapatkan dan mengakses informasi.
- b). Sarana berupa gedung kantor yang representatif sebagai penunjang utama semua kegiatan Dinas. Dengan sarana prasarana yang memadai diharapkan dapat meningkatkan kinerja aparatur DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu.
- c). Dokumen perencanaan DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu telah tersusun dan dipublikasikan secara terbuka.
- d). Telah melakukan penetapan dan pengukuran kinerja individu sampai dengan level staf pelaksana secara berjenjang.

Terhadap tantangan yang dihadapi, DPMPTSP Kab. Kapuas Hulu menetapkan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam upaya meningkatkan capaian kinerja tahun berikutnya :

- 1) Dokumen perencanaan penanaman modal, diantaranya dokumen peraturan daerah tentang penanaman modal telah selesai disusun dan selanjutnya akan disusun peraturan-peraturan pendukungnya, secara bertahap.
- 2) Meningkatkan kegiatan pengendalian penanaman modal, melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku usaha.



- 3) Meningkatkan kualitas dan kemampuan aparatur melalui bimbingan teknis maupun pendidikan singkat tentang pelayanan perizinan di bidang penanaman modal.
- 4) Menambah alokasi dana untuk pelayanan bergerak agar lebih optimal dan lebih menjangkau pelaku usaha di wilayah Kab. Kapuas Hulu.
- 5) Mengoptimalkan promosi penanaman modal melalui penyusunan strategi promosi penanaman modal agar kegiatan promosi lebih efektif dan efisien.

B. SARAN

Dalam upaya mengatasi tantangan permasalahan di masa yang akan datang, DPMPSTSP Kab. Kapuas Hulu mengupayakan langkah sebagai berikut :

- a) Mengupayakan peningkatan koordinasi lintas sektor dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan penanaman modal, karena sifatnya yang multisektor mengharuskan adanya kolaborasi, sinergi langkah dan strategi dari seluruh *stakeholder*. Pemerintah yang merupakan institusi pengambil kebijakan publik, sebagai penentu aturan main tentunya harus memiliki peran besar dalam pengembangan investasi yang terarah, fokus serta bertujuan memastikan kemanfaatan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
- b) Mengupayakan penyusunan profil dan peta potensi investasi daerah, sebagai langkah awal untuk meningkatkan promosi penanaman modal daerah.
- c) Meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur khususnya di bidang pelayanan penanaman modal melalui pendidikan dan pelatihan formal maupun non formal sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada pelaku usaha.
- d) Meningkatkan fungsi pengendalian penanaman modal di wilayah Kab. Kapuas

Hulu melalui kegiatan pembinaan dan pendampingan pada pelaku usaha.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja organisasi perangkat daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan LKIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi sebagai pijakan dalam peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin berkualitas.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 1 /DPM/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diperlukan alat bantu ukur berupa indikator kinerja Utama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 352);
 2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali ,terakhir dengan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 69 Tahun 2022 tentang kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja sebagaimana Diktum kesatu bertujuan untuk :
- Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan Manajemen Kinerja Organisasi;
 - Mengukur pencapaian suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- KETIGA : Indikator Kinerja dimanfaatkan sebagai :
- Perencanaan strategis perangkat daerah;
 - Perencanaan tahunan Perangkat daerah;
 - Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
 - Penyusunan laporan kinerja instansi Pemerintah perangkat daerah;
 - Pelaksanaan evaluasi kinerja;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau

Pada tanggal Januari 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Kapuas Hulu,



DIDIK WIDHYANTO, S. Sos., M.AP

Pembina Utama Muda

NIP.19710312 199101 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 1 /DPM/2025


TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAPUAS HULU

Sasaran	Indikator	Satuan	Formula / Perhitungan	Sumber Data / Kelompok Kerja
Menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan berdaya saing	Nilai Realisasi Investasi berdasarkan pemenuhan komitmen	Milyar Rupiah	Rekapitulasi Realisasi Investasi Berdasar Pemenuhan Komitmen	Sistem OSS RBA / Kelompok Kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Nilai Realisasi Investasi berdasarkan laporan penanaman modal	Milyar Rupiah	Rekapitulasi Realisasi Investasi Berdasar Laporan Penanaman Modal (LKPM)	Sistem OSS RBA / Kelompok Kerja Penanaman Modal
Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu	Nilai SAKIP	Predikat	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	Laporan hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu
Meningkatnya kualitas pelayanan publik DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu	Nilai survei kepuasan masyarakat (SKM)	Angka	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Hasil Pengolahan Data SKM DPMPTSP Kabupaten Kapuas Hulu / Kelompok Kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kapuas Hulu,

DIDIK WIDIYANTO, S. Sos.,M.AP
Pembina Utama Muda
NIP.19710312 199101 1 001

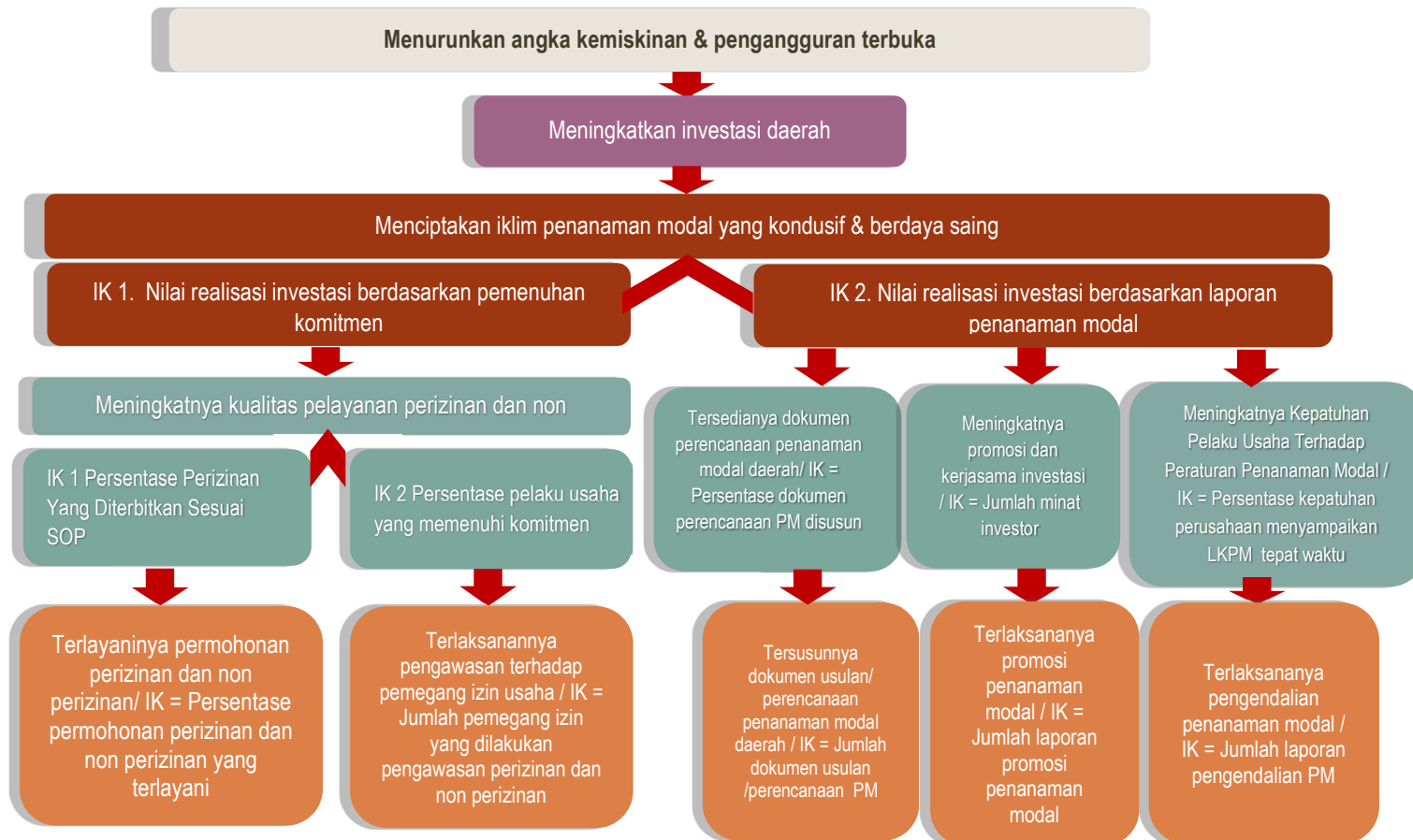
CASCADING DPMPTSP

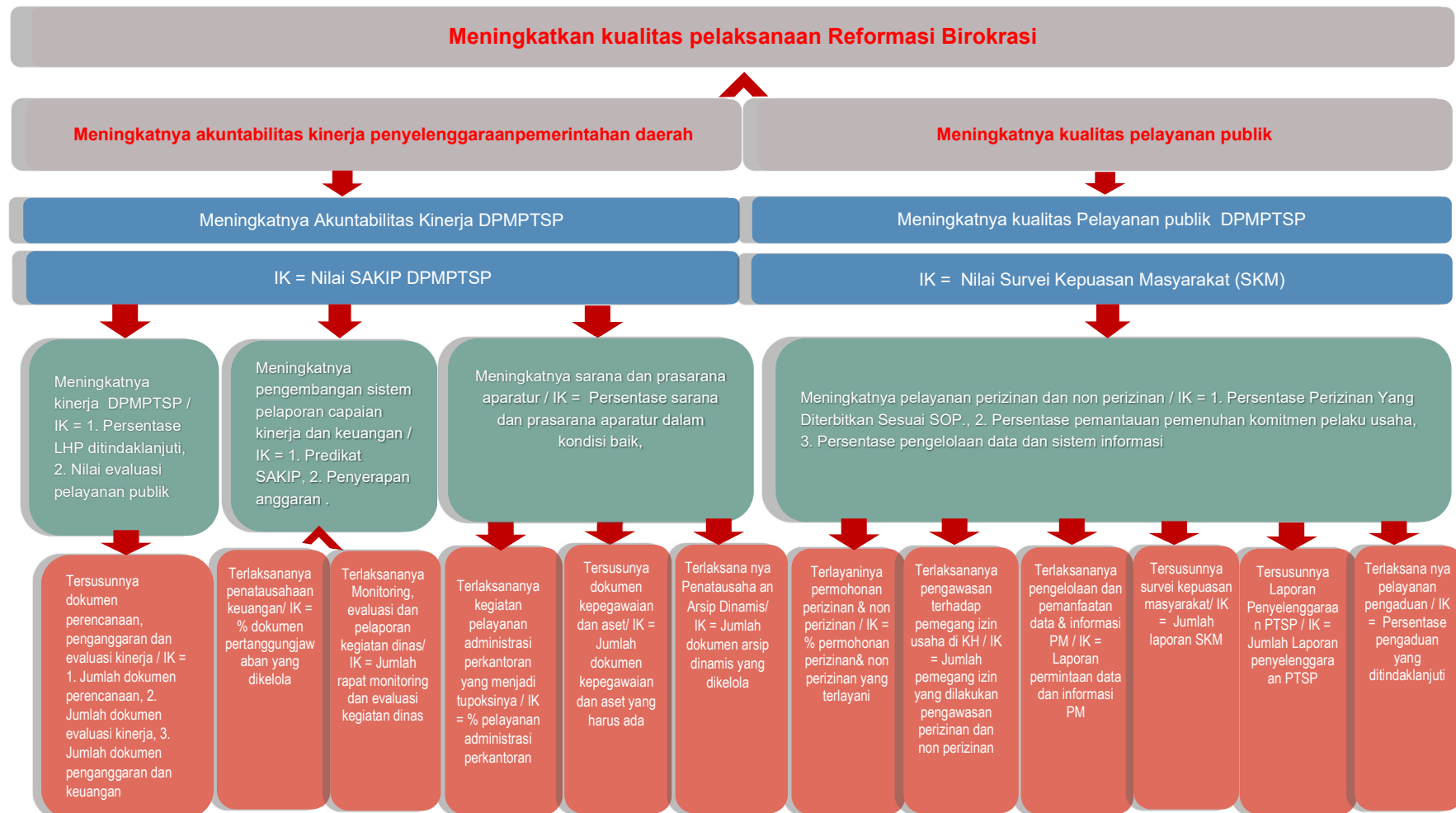
SASARAN STRATEGIS/ESSELON II		ESSELON III / JF AHLI MADYA			ESSELON IV / JF AHLI MUDA			PELAKSANA							
kinerja	indikator	program/kegiatan	kinerja	indikator	sub kegiatan	kinerja	indikator	kinerja	indikator	NAMA JABATAN					
Menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan berdaya saing	Nilai realisasi investasi berdasarkan pemenuhan komitmen	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Sesuai SOP	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Terlayannya permohonan perizinan dan non perizinan	Persentase permohonan perizinan dan non perizinan yang terlayani	Terlaksananya proses pengadministrasian perizinan	Jumlah dokumen laporan pengadministrasian perizinan	Pengadministrasi perizinan					
				Terlayannya permohonan perizinan dan non perizinan				Jumlah permohonan perizinan dan non perizinan yang dilayani	Analisis Dokumen Perizinan						
				Tersusunnya draft rekomendasi kebijakan tentang pelayanan perizinan berusaha				Jumlah draft rekomendasi kebijakan tentang pelayanan perizinan yang disusun							
				Terlaksananya penyiapan bahan dan data di bidang pengelolaan data bahan ketatalaksanaan pelayanan perizinan				Jumlah bahan dan data ketatalaksanaan pelayanan perizinan melalui OSS dan siCantik yang disiapkan	Pengelola Bahan Ketatalaksanaan Pelayanan Perizinan						
								Persentase monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan bahan ketatalaksanaan pelayanan perizinan							
	Nilai realisasi investasi berdasarkan laporan penanaman modal	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Tersedianya dokumen perencanaan penanaman modal daerah	Persentase pelaku usaha yang memenuhi komitmen	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Terlaksananya pengawasan terhadap pemegang izin usaha	Jumlah pemegang izin yang dilakukan pengawasan perizinan dan non perizinan	Terlaksananya pengadministrasian pengawasan terhadap pemegang izin usaha	Jumlah laporan pengawasan terhadap pemenuhan komitmen	Pengadministrasi perizinan					
				Persentase dokumen perencanaan PM yang disusun				Tersusunnya draft dokumen perencanaan/ pengkajian /perencanaan /pengusulan	Jumlah draft dokumen perencanaan/ pengkajian / pengusulan penanaman modal daerah	Analisis iklim usaha dan kerjasama					
				Terkelolanya data dan bahan penanaman modal				Persentase data penanaman modal diperbaharui	Pengadministrasi Umum						
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi	Jumlah minat investor	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya promosi penanaman modal	Jumlah laporan promosi penanaman modal	Tersedianya bahan promosi investasi daerah	Jumlah bahan promosi penanaman modal yang disiapkan	analisis penanaman modal
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal	Persentase kepatuhan perusahaan menyampaikan LKPM tepat waktu	Pengawasan Penanaman Modal	Terlaksananya pengendalian penanaman modal	Jumlah laporan pengendalian PM	Terlaksananya pemantauan, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal	Jumlah draft laporan pengendalian penanaman modal yang disiapkan	Pengawas penanaman modal
													Terlaksananya pendampingan LKPM terhadap pelaku usaha	Jumlah laporan pendampingan	tenaga pendamping
														Jumlah pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	

SASARAN STRATEGIS/ESSELON II		ESSELON III / JF AHLI MADYA			ESSELON IV / JF AHLI MUDA			PELAKSANA		
kinerja	indikator	program/kegiatan	kinerja	indikator	sub kegiatan	kinerja	indikator	kinerja	indikator	NAMA JABATAN
Meningkatnya akuntabilitas kinerja DPMTSP	Nilai SAKIP DPMTSP	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja	Predikat SAKIP DPMTSP	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja DPMTSP	Jumlah dokumen perencanaan	Tersusunnya draft dokumen perencanaan dan program dinas	Jumlah draft dokumen perencanaan dan program yang disiapkan	Pengadministrasi Perencanaan dan Program
							Jumlah dokumen pelaporan kinerja	Tersusunnya draft dokumen evaluasi kinerja	Jumlah draft dokumen evaluasi kinerja	
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas	Jumlah dokumen penganggaran	Tersusunnya draft dokumen penganggaran	Jumlah draft dokumen penganggaran disiapkan	pengadministrasi perencanaan dan program
							Jumlah rapat monitoring dan evaluasi kegiatan dinas	Tersusunnya draf laporan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas	Jumlah draft laporan monitoring dan evaluasi disusun	pengadministrasi perencanaan dan program
			Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset	Persentase pengadministrasian keuangan	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya penatausahaan keuangan SKPD	Persentase dokumen pertanggungjawaban yang dikelola	Terlaksananya pengadministrasian keuangan OPD	Persentase pengadministrasian keuangan dikelola	Bendahara
									Jumlah draft laporan keuangan	Pengadministrasi keuangan
				Persentase pengadministrasian aset dinas	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik yang dikelola dinas	Tersusunnya dokumen perencanaan kebutuhan dan data barang milik daerah yang dikelola dinas	Jumlah dokumen barang milik daerah tersedia	pengadministrasi umum
								Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dikelola dinas	Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik yang dikelola dinas	pengadministrasi umum
				Terpeliharanya kebersihan gedung dan luar gedung DPMTSP	Jumlah gedung yang terpelihara kebersihannya	Pramu Kebersihan				
				Tersedianya peralatan kerumahtanggaan dinas	Jumlah pegawai yang disediakan minum dan snack	Pramubakti				
				Terlaksananya penjagaan keamanan dan ketertiban lingkungan di dalam maupun luar gedung DPMTSP	Jumlah gedung yang dijaga keamanannya	Petugas keamanan				
			Persentase terjadinya gangguan ketertiban/keamanan di lingkungan gedung DPMTSP							
			Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan kepegawaian	Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya kebutuhan surat tugas kedinasan sesuai dengan standar operasional prosedur untuk ketertiban di lingkungan unit kerja	Jumlah surat tugas yang disiapkan dalam 1 tahun	pengadministrasi umum
Persentase kebutuhan kedinasan pimpinan terpenuhi	pengadministrasi umum									

SASARAN STRATEGIS/ESSELON II		ESSELON III / JF AHLI MADYA			ESSELON IV / JF AHLI MUDA			PELAKSANA		
kinerja	indikator	program/kegiatan	kinerja	indikator	sub kegiatan	kinerja	indikator	kinerja	indikator	NAMA JABATAN
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terkelolanya arsip dinamis dinas	Jumlah surat keluar dan masuk selama 1 tahun	pengadministrasi umum
									Jumlah dokumen yang terdokumentasi dalam bentuk digital	pranata komputer terampil pelaksana
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya dokumen kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian yang dikelola	Tersedianya data pegawai yang akan mengusulkan kenaikan pangkat, cuti dan izin	Jumlah dokumen usulan kenaikan pangkat, cuti dan izin pegawai yang dikelola	pengadministrasi umum
Meningkatnya kualitas pelayanan publik DPMPSTP	Nilai SKM DPMPSTP	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase pengelolaan pengaduan	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Laporan permintaan data dan informasi penanaman modal	Terlaksananya penyiapan bahan dan data di bidang pengelolaan data penanaman modal	Jumlah bahan dan data penanaman modal disiapkan	Pengelola Data
				Persentase pengelolaan data da sistem informasi		Terlaksananya survei kepuasan masyarakat	Jumlah laporan SKM		Jumlah draft laporan SKM yang disusun	Penyusun bahan informasi dan publikasi
						Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan PTSP	Jumlah Laporan penyelenggaraan PTSP		Jumlah draft laporan penyelenggaraan PTSP disusun	Pengelola Data
						Terlaksananya pelayanan pengaduan	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti		Jumlah pengaduan ditindaklanjuti selama 1 tahun	Pengelola Pengaduan

POHON KINERJA DPMPTSP







PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIDIK WIDIYANTO, S.Sos., M.AP

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : FRANSISKUS DIAAN

Jabatan : BUPATI KAPUAS HULU

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Putussibau, 25 November 2024

Pihak Kedua,
BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kapuas Hulu,

DIDIK WIDIYANTO, S.Sos., M.AP.

Pembina Utama Muda
NIP. 19710312 199101 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Sasaran	Indikator	Target
1.	Menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan berdaya saing	Nilai realisasi investasi berdasarkan pemenuhan komitmen	74,18 Milyar Rupiah
		Nilai realisasi investasi berdasarkan laporan penanaman modal	346 Milyar Rupiah
2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi DPMPSTP Kabupaten Kapuas Hulu	Nilai SAKIP	69.50
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	83.00


No	Program	Rp.
1.	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3,103,526,300
2.	Program Promosi Penanaman Modal	Rp 25,828,000
3.	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 75,074,400
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 626,895,000
5.	Program Pemngembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 27,590,000
6.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Moda	Rp 35,080,000

Putussibau, 25 November 2024

Pihak Kedua,
BUPATI KAPUAS HULU,


FRANSISKUS DIAAN

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kapuas Hulu,


DIDIK WIDIYANTO, S.Sos.,M.AP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710312 199101 1 001

PENGUKURAN KINERJA KEPALA DINAS (IKU) TRIWULAN I TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET	REALISASI TW 1	% CAPAIAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)		% CAPAIAN
								APBD Murni	Realisasi TW 1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan investasi Daerah	Menciptakan Iklim Penanaman Modal yang kondusif dan berdaya saing	1. Nilai Realisasi Investasi berdasarkan pemenuhan komitmen	74,18 Milyar Rupiah	32,569 Milyar Rupiah	43,91	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	75.074.400	-	0,00
			2. Nilai Realisasi Investasi berdasarkan laporan penanaman modal	346 Milyar Rupiah	330,13 Milyar Rupiah	95,41	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	25.828.000	5.730.000	22,19
2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPSTP	Nilai SAKIP	69,50	0	0,00	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	27.590.000	-	0,00
		Meningkatkan Kualitas pelayanan publik DPMPSTP	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	83,00	86,13	103,77	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	626.895.000	16.337.000	2,61
							PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	35.080.000	-	0,00
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.101.699.674	573.024.068	18,47
CAPAIAN						60,77	JUMLAH	3.892.167.074	595.091.068	15,29

Keterangan :

* Realisasi investasi :

-Penyampaian LKPM
 -Izin tervalidasi

Rp. 330.127.894.223 (rilis BKPM)
 Rp. 32.569.275.001
 Rp. 362.697.169.224

* Realisasi Anggaran :

-Gaji/TPP
 -Belanja Operasi (Program/Kegiatan)
 Jumlah

Rp. 445.404.199,00 23,38 %
 Rp. 149.686.869,00 7,53 %
 Rp. 595.091.068,00 15,29 %

Putussibau, 8 Mei 2024
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kabupaten Kapuas Hulu,


DICIH WELIYANTO, S.Sos.,M.AP.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19710312 199101 1 001

PENGUKURAN KINERJA KEPALA DINAS (IKU) TRIWULAN II TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET	REALISASI TW 2	% CAPAIAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)		% CAPAIAN
								APBD Murni	Realisasi TW 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan investasi Daerah	Menciptakan Iklim Penanaman Modal yang kondusif dan berdaya saing	1. Nilai Realisasi Investasi berdasarkan pemenuhan komitmen	74,18 Milyar Rupiah	34,327 Milyar Rupiah	46,28	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	75.074.400	7.350.000	9,79
			2. Nilai Realisasi Investasi berdasarkan laporan penanaman modal	346 Milyar Rupiah	117,115 Milyar Rupiah	33,85	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	25.828.000	10.390.000	40,23
2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPPTSP	Nilai SAKIP	69,50	-	0,00	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	27.590.000	-	0,00
		Meningkatkan Kualitas pelayanan publik DPMPPTSP	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	83,00	89,60	107,95	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	626.895.000	49.202.000	7,85
							PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	35.080.000	5.250.000	14,97
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.101.699.674	1.379.918.509	44,49
C A P A I A N						46,03	JUMLAH	3.892.167.074	1.452.110.509	37,31

Keterangan :

* Realisasi investasi s/d Triwulan II :

-Penyampaian LKPM	Rp	447.242.780.948,00	(penghitungan sementara)
-Izin tervalidasi	Rp	66.895.775.001,00	
	Rp	514.138.555.949,00	

* Realisasi Anggaran s/d Triwulan II :

-Gaji/TPP	Rp	1.023.676.547,00	53,73 %
-Belanja Operasi (Program/Kegiatan)	Rp	428.433.962,00	21,56 %
Jumlah	Rp	1.452.110.509,00	37,31 %

Putussibau, 16 Juli 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kapuas Hulu,



S.D.K. WIDIYANTO, S.Sos.,M.AP.

Pembina Utama Muda
NIP. 19710312 199101 1 001

PENGUKURAN KINERJA KEPALA DINAS (IKU) TRIWULAN III TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET	REALISASI TW 3	% CAPAIAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)		% CAPAIAN
								APBD Murni	Realisasi TW 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan investasi Daerah	Menciptakan Iklim Penanaman Modal yang kondusif dan berdaya saing	1. Nilai Realisasi Investasi berdasarkan pemenuhan komitmen	74,18 Milyar Rupiah	39,88 Milyar Rupiah	53,76	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	75.074.400	30.221.600	40,26
			2. Nilai Realisasi Investasi berdasarkan laporan penanaman modal	346 Milyar Rupiah	87,412 Milyar Rupiah	25,26	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	25.828.000	15.280.500	59,16
2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPTSP	Nilai SAKIP	69,50	69,71	100,30	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	27.590.000	15.314.400	55,51
		Meningkatkan Kualitas pelayanan publik DPMPTSP	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	83,00	89,85	108,25	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	626.895.000	160.139.600	25,54
							PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	35.080.000	6.446.300	18,38
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.057.524.114	2.153.394.945	70,43
C A P A I A N						71,89	JUMLAH	3.847.991.514	2.380.797.345	61,87

Keterangan :

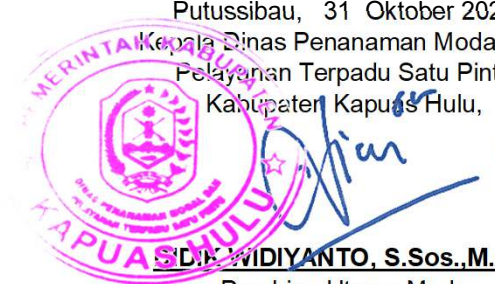
* Realisasi investasi s/d Triwulan III :

-Penyampaian LKPM	Rp	534.655.383.758,00	(penghitungan sementara)
-Izin tervalidasi OSS RBA	Rp	106.779.975.765,00	
	Rp	641.435.359.523,00	

* Realisasi Anggaran s/d Triwulan III :

-Gaji/TPP	Rp	1.469.962.919,00	78,98 %
-Belanja Operasi (Program/Kegiatan)	Rp	910.834.426,00	45,84 %
Jumlah	Rp	2.380.797.345,00	61,87 %

Putussibau, 31 Oktober 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kapuas Hulu,



S.D.K. WIDIYANTO, S.Sos., M.AP.

Pembina Utama Muda
NIP. 19710312 199101 1 001

PENGUKURAN KINERJA KEPALA DINAS (IKU) TRIWULAN IV TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET	REALISASI TW 4	% CAPAIAN	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)			% CAPAIAN
								APBD Murni	APBD Perubahan	Realisasi TW 4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan investasi Daerah	Menciptakan Iklim Penanaman Modal yang kondusif dan berdaya saing	Nilai Realisasi Investasi berdasarkan pemenuhan komitmen	74,18 Milyar Rupiah	105,688 Milyar Rupiah	142,48	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	75.074.400	75.074.400	74.505.000	99,24
			Nilai Realisasi Investasi berdasarkan laporan penanaman modal	346 Milyar Rupiah	160,7 Milyar Rupiah	46,45	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	25.828.000	25.828.000	25.154.700	97,39
2	Meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPPTSP	Nilai SAKIP	69,50	69,71	100,30	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	27.590.000	27.590.000	26.721.200	96,85
		Meningkatkan Kualitas pelayanan publik DPMPPTSP	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	83,00	90,24	108,72	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	626.895.000	626.895.000	616.004.800	98,26
							PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	35.080.000	35.080.000	34.977.300	99,71
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.057.524.114	3.103.526.300	2.980.904.874	97,49
CAPAIAN						99,49	JUMLAH	3.847.991.514	3.893.993.700	3.758.267.874	96,51

Keterangan :

* Realisasi investasi s/d Triwulan IV :



-Penyampaian LKPM	Rp	695.376.532.389,00	(penghitungan sementara)
-Izin tervalidasi OSS RBA	Rp	212.468.173.285,00	
	Rp	907.844.705.674,00	

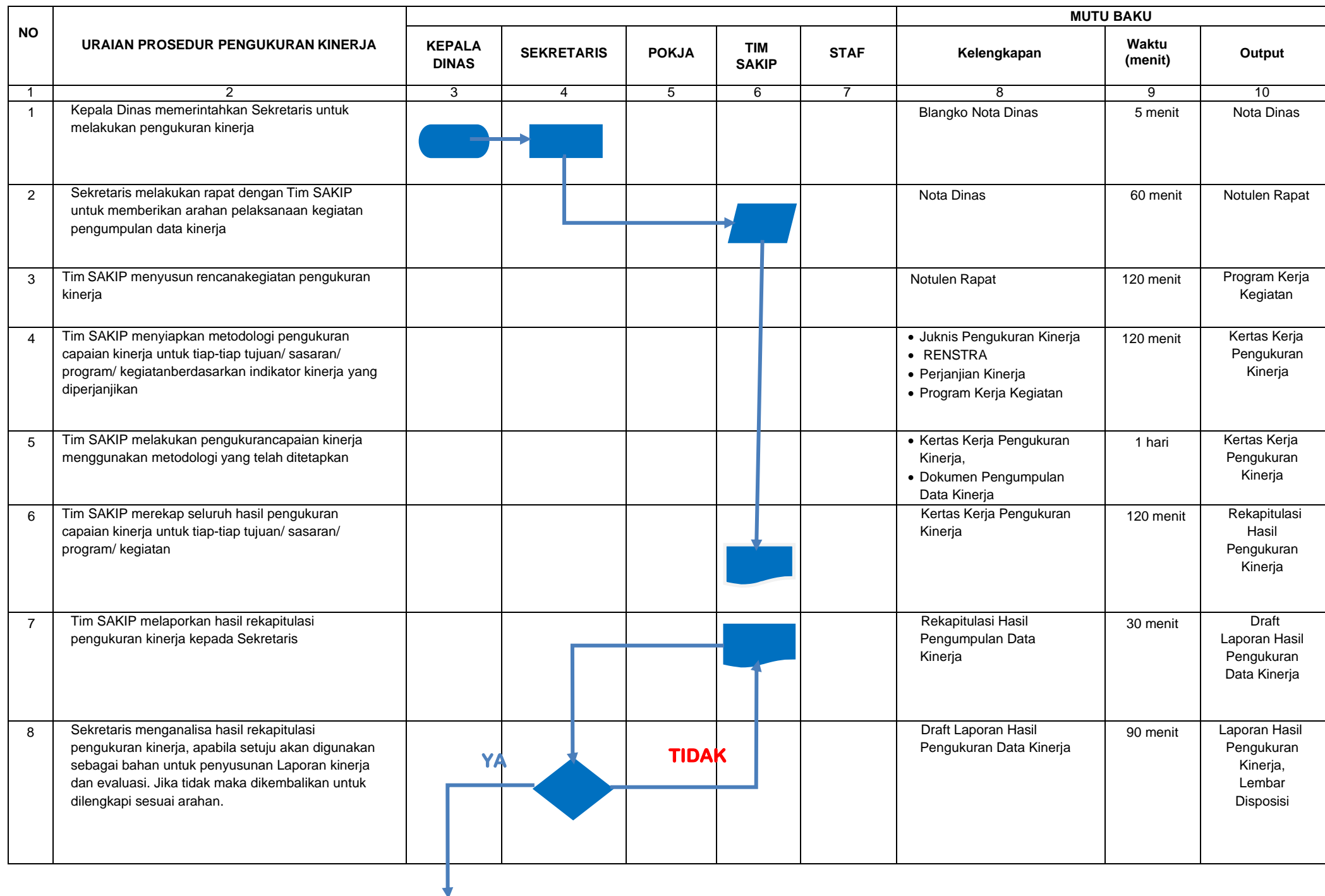
* Realisasi Anggaran s/d Triwulan IV :



-Gaji/TPP	Rp	1.862.492.736,00	97,66 %
-Belanja Operasi (Program/Kegiatan)	Rp	1.895.775.138,00	95,41 %
Jumlah	Rp	3.758.267.874,00	96,51 %

Putussibau, 31 Januari 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kapuas Hulu,


EDY WIDYANTO, S.Sos., M.AP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710312 199101 1 001

<div></div> <div>PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jalan Antasari Nomor 04 Putussibau Kode Pos 78711 Telp./Fax. (0567) 21022 web : www.dpmpstsp.kapuashulukab.go.id email : dpmpstsp@kapuashulukab.go.id PUTUSSIBAU</div>	Nomor SOP	503/13/DPM
	Tgl Pembuatan	13 November 2024
	Tgl Revisi	
	Tgl Pengesahan	
	Disahkan Oleh	<div> Kepala Dinas DIDIK WIDIYANTO, S.Sos, M.AP NIP. 19710312 199101 1 001</div>
	Nama SOP	Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;2. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 29 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;3. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu;4. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kapuas Hulu.	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki pemahaman tentang pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen pengumpulan dan pengukuran data kinerja2. Paham tentang regulasi dalam penyusunan dokumen pengumpulan dan pengukuran data kinerja3. Mampu mengoperasikan perangkat komputer	
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :	
<ol style="list-style-type: none">1. Juknis Pengukuran Kinerja2. RENSTRA3. Perjanjian Kinerja4. Program Kerja Kegiatan	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. ATK	
Peringatan :	Pencatatan Dan Pendataan :	
Keterlambatan Penyusunan Dokumen Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja menyebabkan kegiatan operasional yang tertunda	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja	



NO	URAIAN PROSEDUR PENGUKURAN KINERJA						MUTU BAKU		
		KEPALA DINAS	SEKRETARIS	POKJA	TIM SAKIP	STAF	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Sekretaris dan Tim SAKIP melaporkan data pengukuran kinerja kepada Kepala Dinas						Laporan Hasil Pengukuran Kinerja, Lembar Disposisi	30 menit	Disposisi kepala Dinas
10							Arsip Hasil Pengumpulan Data Kinerja		

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. KAPUAS HULU
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						3.892.167.074,00							4.501.923.564,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.892.167.074,00							4.501.923.564,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						3.892.167.074,00							4.501.923.564,00	
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	predikat SAKIP DPMPTSP	-			B predikat	3.101.699.674,00						-	3.566.489.464,00	
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi kinerja	-			9 dokumen	34.155.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	56.042.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	16.755.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		18.450.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		3.470.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		3.762.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		3.597.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		3.762.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	7.200.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		10.846.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	10.200.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		12.155.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah dokumen administrasi keuangan	-			19 dokumen	2.076.362.374,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	2.279.165.764,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	1.905.272.374,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		2.081.220.764,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	130.615.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		143.165.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	24.575.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		31.867.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	6.700.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		7.722.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				4 Laporan	9.200.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		10.736.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		4.455.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah</i>	-			2 dokumen	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	6.204.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		3.163.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				2 Laporan	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		3.040.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			1 dokumen	48.786.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	101.327.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	28.416.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		47.609.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	10.370.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		15.218.500,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 Orang	10.000.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		38.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi Umum	-			1 dokumen	399.488.100,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	523.796.700,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.062.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		15.802.490,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	79.658.100,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		86.060.810,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	25.199.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		33.055.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	7.200.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		7.920.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	264.879.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		350.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	12.490.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		30.958.400,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			1 dokumen	37.098.180,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	58.900.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	37.098.180,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		58.900.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			1 dokumen	418.815.020,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	438.940.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	59.037.868,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		71.940.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	359.777.152,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		367.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			1 dokumen	86.995.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	102.113.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	61.355.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		63.283.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	25.640.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		25.630.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		13.200.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase dokumen perencanaan penanaman modal disusun	-			20 persen	27.590.000,00						-	123.349.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang diberikan insentif	-			1 pelaku usaha	0,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	pemangku kebijakan, pelaku usaha, DPMPTSP	-	40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				1 Dokumen	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	pemangku kebijakan, pelaku usaha, DPMPTSP		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko														
			Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko				1 Dokumen	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	pemangku kebijakan, pelaku usaha, DPMPTSP		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	jumlah dokumen peta potensi investasi daerah	-			1 dokumen	27.590.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	pemangku kebijakan, pelaku usaha, DPMPTSP	-	83.349.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	pemangku kebijakan, pelaku usaha, DPMPTSP		33.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi</i>				1 Daerah	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	pemangku kebijakan, pelaku usaha, DPMPTSP		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	27.590.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	pemangku kebijakan, pelaku usaha, DPMPTSP		30.349.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	<i>jumlah minat investasi</i>	-			1 minat	25.828.000,00						-	39.125.000,00	
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>jumlah laporan promosi penanaman modal</i>	-			1 laporan	25.828.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	pelaku usaha, calon investor, pemangku kepentingan, DPMPTSP	-	39.125.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	25.828.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	pelaku usaha, calon investor, pemangku kepentingan, DPMPTSP		33.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota</i>				1 Dokumen	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	pelaku usaha, calon investor, pemangku kepentingan, DPMPTSP		6.125.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	<i>persentase dokumen perizinan dan non perizinan diterbitkan sesuai SOP</i>	-			100 persen	75.074.400,00						-	93.536.300,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Rata-rata waktu penyelesaian perizinan diterbitkan</i>	-			3-5 Hari	75.074.400,00			Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	pelaku usaha	-	93.536.300,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>				700 Pelaku Usaha	72.020.200,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	pelaku usaha		79.222.220,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														
			<i>Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>				20 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	pelaku usaha		4.356.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														
			<i>Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha</i>				10 Kegiatan Usaha	3.054.200,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	pelaku usaha		9.958.080,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	<i>Persentase kepatuhan pelaku usaha / perusahaan menyampaikan LKPM</i>	-			50 persen	626.895.000,00						-	640.783.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah dokumen laporan pelaksanaan pengendalian PM</i>	-			1 dokumen	626.895.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	pelaku usaha, perusahaan, DPMTSP	-	640.783.800,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														
			<i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>				11 Kegiatan Usaha.	90.046.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	pelaku usaha, perusahaan, DPMTSP		95.875.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>				286 Pelaku Usaha	330.173.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	pelaku usaha, perusahaan, DPMTSP		335.668.600,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal														
			<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha</i>				18 Kegiatan Usaha	206.676.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	pelaku usaha, perusahaan, DPMTSP		209.240.200,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	<i>jumlah laporan pengelolaan data dan sistem informasi</i>	-			2 laporan	35.080.000,00						-	38.640.000,00	
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>persentase sistem informasi perizinan & non perizinan dikelola</i>	-			100 persen	35.080.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	DPMTSP	-	38.640.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				1 Dokumen	35.080.000,00	Kab. Kapuas Hulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	-	DPMPTSP		38.640.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	J U M L A H							3.892.167.074,00						4.501.923.564,00		



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Alamat : Jalan Antasari Nomor 04 Putussibau Kode Pos 78711 Telp./Fax. (0567) 21022
 Email : dpmptspkh@yahoo.com
 PUTUSSIBAU

RENCANA AKSI 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAPUAS HULU

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024 (TAHUNAN)	TARGET PER TRIWULAN				Anggaran (Rp)	SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB
										I	II	III	IV			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Meningkatnya nilai realisasi investasi daerah	Nilai Realisasi Investasi	Milyar Rupiah	420,28	105,07	210,14	315,21	420,28	3.864.577.074	DAK/DAU	Kepala Dinas
2	18				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat	B	0	0	B	0	3.101.699.674	DAU	Sekretariat
2	18	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen	14	9	2	1	2	34.155.000	DAU	Sekretariat
2	18	1	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan disusun	dokumen	9	8	1	0	0	16.755.000	DAU	Analisis Kebijakan

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024 (TAHUNAN)	TARGET PER TRIWULAN				Anggaran (Rp)	SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB
										I	II	III	IV			
2	18	1	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang tepat waktu	laporan	1	0	0	0	1	7.200.000	DAU	Analisis Kebijakan
2	18	1	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan rapat evaluasi kinerja	laporan	4	1	1	1	1	10.200.000	DAU	Analisis Kebijakan
2	18	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan	Jumlah dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	dokumen	9	6	7	7	10	2.076.362.374	DAU	Sekretariat
2	18	1	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah daftar gaji dan tunjangan	daftar	1	3	4	4	3	1.905.272.374	DAU	Analisis Kebijakan
2	18	1	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan	dokumen	1	0	0	0	1	130.615.000	DAU	Analisis Kebijakan
2	18	1	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen akuntansi SKPD yang tepat waktu	dokumen	1	0	0	0	1	24.575.000	DAU	Analisis Kebijakan
2	18	1	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tepat waktu	laporan	1	0	0	0	1	6.700.000	DAU	Analisis Kebijakan

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024 (TAHUNAN)	TARGET PER TRIWULAN				Anggaran (Rp)	SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB
										I	II	III	IV			
2	18	1	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan./Triwulan/ semesteran	laporan	4	1	1	1	1	9.200.000	DAU	Analisis Kebijakan
2	18	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	dokumen	1	1	0	0	0	48.786.000	DAU	Sekretariat
2	18	1	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan atributnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	dokumen	1	0	0	0	1	28.416.000	DAU	Kasubbag, Umpan
2	18	1	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	dokumen	1	0	0	0	1	10.370.000	DAU	Kasubbag, Umpan
2	18	1	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat	orang	2	0	1	1	0	10.000.000	DAU	Kasubbag, Umpan
2	18	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya pelayanan administrasi umum	Jumlah Dokumen administrasi Umum	dokumen	1	0	0	0	1	399.488.100	DAU	Sekretariat
2	18	1	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket penyediaan komponen listrik	paket	1	0	0	0	1	10.062.000	DAU	Kasubbag, Umpan

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024 (TAHUNAN)	TARGET PER TRIWULAN				Anggaran (Rp)	SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB
										I	II	III	IV			
2	18	1	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	paket	1	0	0	0	1	79.658.100	DAU	Kasubbag, Umpar
2	18	1	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket penyediaan barang cetakan	paket	1	0	0	0	1	25.199.000	DAU	Kasubbag, Umpar
2	18	1	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket penyediaan bahan bacaan	paket	1	0	0	0	1	7.200.000	DAU	Kasubbag, Umpar
2	18	1	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan kegiatan rapat koordinasi & konsultasi	laporan	1	0	0	0	1	264.879.000	DAU	Kasubbag, Umpar
2	18	1	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah klasifikasi arsip	klasifikasi	2	2	2	2	2	12.490.000	DAU	Kasubbag, Umpar
2	18	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	dokumen	1	0	0	0	1	37.098.180	DAU	Sekretariat
2	18	1	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket pengadaan peralatan dan mesin lainnya	paket	1	0	0	0	1	37.098.180	DAU	Kasubbag, Umpar
2	18	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	dokumen	1	0	0	0	1	418.815.020	DAU	Sekretariat

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024 (TAHUNAN)	TARGET PER TRIWULAN				Anggaran (Rp)	SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB
										I	II	III	IV			
2	18	1	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi, SDA & listrik dibayarkan	bulan	12	3	3	3	3	59.037.868	DAU	Kasubbag, Umpar
2	18	1	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan gaji tenaga kontrak dibayarkan	bulan	12	3	3	3	3	359.777.152	DAU	Kasubbag, Umpar
2	18	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	dokumen	1	0	0	0	1	86.995.000	DAU	Sekretariat
2	18	1	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara & dibayarkan pajaknya	unit	6	0	2	2	2	61.355.000	DAU	Kasubbag, Umpar
2	18	1	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	unit	6	0	3	3	0	25.640.000	DAU	Kasubbag, Umpar
2	18	2			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Tersedianya dokumen perencanaan penanaman modal daerah	Persentase dokumen perencanaan PM yang disusun	persen	50	0	0	0	50	2.790.000	DAU	Ketua Pokja Penanaman Modal
2	18	2	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten /Kota	Tersedianya Peta Potensi Investasi Kabupaten /Kota	Jumlah dokumen peta potensi	dokumen	1	0	0	0	1	2.790.000	DAU	Ketua Pokja Penanaman Modal

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024 (TAHUNAN)	TARGET PER TRIWULAN				Anggaran (Rp)	SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB
										I	II	III	IV			
2	18	2	2.02	0004	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten /Kota	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	dokumen	1	0	0	0	1	2.790.000	DAU	Analisis Kebijakan
2	18	3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi	Jumlah Minat Investor	minat	1	0	0	0	1	25.828.000	DAU	Ketua Pokja Penanaman Modal
2	18	3	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan promosi penanaman modal	laporan	1	0	0	0	1	25.828.000	DAU	Ketua Pokja Penanaman Modal
2	18	3	2.01	0003	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	kegiatan	1	0	0	0	1	25.828.000	DAU	Analisis Kebijakan
2	18	4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	Persentase dokumen perizinan dan non perizinan diterbitkan sesuai SOP	persen	100	100	100	100	100	75.074.400	DAU	Ketua Pokja PTSP
2	18	4	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rata-rata waktu penyelesaian perizinan diterbitkan	hari	3-5 hari	3-5 hari	3-5 hari	3-5 hari	3-5 hari	75.074.400	DAU	Ketua Pokja PTSP

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024 (TAHUNAN)	TARGET PER TRIWULAN				Anggaran (Rp)	SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB
										I	II	III	IV			
2	18	4	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	500	100	150	150	100	72.020.200	DAU	Penata Perizinan
2	18	4	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	10	3	3	2	2	3.054.200	DAU	Penata Perizinan
2	18	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Penanaman Modal	Persentase kepatuhan perusahaan menyampaikan LKPM tepat waktu	persen	1	50	50	50	50	626.895.000	DAK/DAU	Ketua Pokja Penanaman Modal
2	18	5	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksnanya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen laporan pelaksanaan pengendalian PM	dokumen	1	0	0	0	1	626.895.000	DAK/DAU	Ketua Pokja Penanaman Modal

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024 (TAHUNAN)	TARGET PER TRIWULAN				Anggaran (Rp)	SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB
										I	II	III	IV			
2	18	5	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha.	11	3	3	4	3	90.046.000	DAK/DAU	Analisis Kebijakan
2	18	5	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha	286	72	72	72	72	330.173.000	DAK/DAU	Analisis Kebijakan
2	18	5	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha	18	4	5	5	4	206.676.000	DAK/DAU	Analisis Kebijakan
2	18	6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	persentase pengelolaan data dan sistem informasi	persen	100	100	100	100	100	35.080.000	DAU	Ketua Pokja PTSP

KODE					PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2024 (TAHUNAN)	TARGET PER TRIWULAN				Anggaran (Rp)	SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB
										I	II	III	IV			
2	18	6	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Jumlah laporan pengelolaan data dan informasi perizinan	laporan	1	0	0	0	1	35.080.000	DAU	Ketua Pokja PTSP
2	18	6	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah laporan penyajian dan pemanfaatan data	laporan	1	0	0	0	1	35.080.000	DAU	Penata Perizinan
							Jumlah laporan SKM	laporan	4	1	1	1	1		DAU	Penata Perizinan
							Jumlah laporan PTSP	laporan	4	1	1	1	1		DAU	Penata Perizinan

Putussibau, Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAPUAS HULU,


ENDIK WIDIYANTO, S.Sos., M.A.P.
Pembina Utama Muda
NIP 19710312 199101 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Antasari No.04 Putussibau Telp. (0567) 21022 Fax. (0567) 21022
Pos-e:dpmpstsp@kapuashulukab.go.id

Rekapitulasi Nilai Realisasi Investasi Melalui Pemenuhan Komitmen Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS RBA) Persektor Tahun 2024

NO	SEKTOR	TOTAL JUMLAH	
		JUMLAH IZIN	NILAI INVESTASI
1	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	0	Rp -
2	Kementerian Kelautan dan Perikanan	268	Rp 43.480.781.001
3	Kementerian Kesehatan	34	Rp 5.304.000.000
4	Kemenerian Komunikasi dan Informasi	1	Rp 250.000.000
5	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	11	Rp 27.378.406.454
6	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2	Rp 300.000.000
7	Kementerian Pariwisata	212	Rp 33.525.460.000
8	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	0	Rp -
9	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	12	Rp 201.000.000
10	Kementerian Perdagangan	839	Rp 72.541.379.930
11	Kementerian Perhubungan	7	Rp 835.000.000
12	Kementerian Perindustrian	288	Rp 12.949.345.900
13	Kementerian Pertanian	278	Rp 15.702.800.000
	JUMLAH	1952	Rp 212.468.173.285

Putussibau, 31 Januari 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kapuas Hulu,



DIDIK WIDIYANTO, S. Sos., M.A.P.

Pembina Utama Muda

NIP 19710312 199101 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Antasari Nomor 04 Putussibau Kode Pos 78716 Telp./Fax. (0567) 21022

Laman : www.dpmptsp.kapuashulukab.go.id

Pos-e : dpmptsp@kapuashulukab.go.id

REKAPITULASI NILAI REALISASI INVESTASI MELALUI PENYAMPAIAN LKPM TAHUN 2024

No.	Jenis Penanaman Modal	Tahun 2024
1	Penanaman Modal Asing (PMA)	Rp 1,332,489,246
2	Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Rp 694,044,043,143
	TOTAL REALISASI (Milyar Rupiah)	Rp 695,376,532,389

Putussibau, 31 Januari 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kapuas Hulu,



DIDIK WIDIYANTO, S.Sos., M.AP.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710312 199101 1 001

HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
TAHUN 2023

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30,00	23,10	23,10
2	Pengukuran Kinerja	30,00	18,60	18,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,80	11,25
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	16,75	16,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja			69,26	69,71
			B	B

No	Catatan
1	Perencanaan Kinerja
a.	Perangkat daerah telah memiliki dokumen perencanaan kinerja secara lengkap dan cukup mencakup rencana strategis 2021-2026, rencana kerja tahun 2023, dan perjanjian kinerja tahun 2023 dari para personil perangkat daerah juga disertai dokumen pendukung berupa pohon kinerja, dokumen cascading, dan dokumen croscutting
b.	Dokumen rencana strategis 2021-2026, rencana kerja tahun 2023, dan perjanjian kinerja tahun 2023 telah dipublikasikan
c.	Perencanaan kinerja oleh perangkat daerah telah memenuhi sebagian besar kualitas yang diharapkan, antara lain telah menetapkan rumusan hasil yang jelas, menetapkan indikator kinerja, dan menetapkan target yang achievable, dan realistis
d.	Dokumen perencanaan kinerja telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras dalam hal rumusan sasaran/tujuan, penggunaan indikator, serta penetapan target kinerja berdasarkan kondisi/hasil yang akan dicapai
e.	Target yang termuat dalam dokumen Perjanjian kinerja eselon II belum disertai dengan satuan hasil (misal; Persen/Rupiah/Predikat, dll)
f.	Dokumen Perencanaan Aktivitas belum sepenuhnya mendukung kinerja
g.	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan kinerja telah dapat dicapai, namun penentuan target belum berdasarkan data yang relevan sehingga diperoleh realisasi yang sangat timpang
2	Pengukuran Kinerja
a.	Terdapat mekanisme pengumpulan data dan pengukuran kinerja
b.	Terdapat definisi operasional yang jelas untuk mengukur indikator kinerja yaitu melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan tanggal 3 Januari 2024, dan Indikator Kinerja Individu (IKI) yang ditetapkan pada tanggal 3 Januari 2022 (meskipun nama jabatan eselon III masih terdapat dalam IKI dan belum disesuaikan dengan perubahan SOTK.
c.	Mekanisme terhadap pengumpulan data atau penetapan sumber data kinerja dalam SK IKI belum sepenuhnya dapat diandalkan, seperti pada : - Nama dokumen sebagai sumber data secara jelas, misal nama laporan/nama daftar/nama rekapitulasi, dan lain-lain; - Lokasi data tersimpan yang mudah ditelusuri/diakses bagi pengguna data, misal nama bidang/nama bagian/nama subbagian/nama subkoordinator, dan lainnya;
	Pengukuran kinerja menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja terlaksana secara berjenjang dan berkesinambungan, dimana pimpinan terlibat dalam pengukuran capaian kinerja seperti hadir dalam rapat monev/pengambilan keputusan, serta memberikan masukan dan catatan untuk hal-hal yang menjadi perhatian
d.	Pengumpulan data kinerja dan pencapaian kinerja belum menggunakan teknologi informasi

3	Pelaporan Kinerja
a.	Perangkat Daerah telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023. Laporan tersebut disusun berdasarkan laporan monitoring dan evaluasi triwulanan
b.	Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, serta hambatan dan upaya perbaikan kinerja.
c.	Analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang terdapat dalam LKjIP tahun 2023 telah dicantumkan namun belum menguraikan apakah nilai capaian anggaran dan capaian kinerja yang dihasilkan tersebut telah efisien atau tidak.
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
a.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan, meskipun tidak melalui penilaian mandiri. Perangkat daerah telah memasukkan topik pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah dalam monitoring dan evaluasi triwulanan
b.	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal perangkat daerah telah dilaksanakan secara memadai. Upaya-upaya spesifik yang perlu dilaksanakan oleh perangkat daerah guna memperbaiki sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah telah diuraikan dalam pembahasan rapat-rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja, beserta tindak lanjut yang telah dilakukan
c.	Implementasi SAKIP perangkat daerah telah meningkat karena telah terdapat hasil dari usaha perangkat daerah untuk menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya

No	Rekomendasi
1	Menguraikan secara jelas Dokumen Perencanaan Aktivitas yang mendukung kinerja
2	Menetapkan target kinerja berbasis data yang relevan dalam perencanaan kinerja;
3	Melengkapi mekanisme pengumpulan data kinerja atau penetapan sumber data kinerja secara jelas dan dapat diandalkan
4	Menggunakan teknologi informasi dalam pengumpulan data kinerja dan pengukuran pencapaian kinerja
5	Melakukan penilaian mandiri atas akuntabilitas kinerja internal perangkat daerah

**PENGOLAHAN DATA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN
DAN PER UNSUR PELAYANAN**

UNIT PELAYANAN : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAPUAS HULU
ALAMAT : Jln. Antasari No. 04
Telp / Fax : (0567) 21022
periode : TAHUN 2024

NILAI PER UNSUR PELAYANAN

NO. RESPONDEN	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	NILAI RATA RATA PER RESPONDEN	
1	3	3	2	4	3	3	3	3	3	27.00	3.00
11	3	3	3	4	3	3	3	3	4	29.00	3.22
12	3	3	3	4	4	4	4	2	4	31.00	3.44
13	4	3	3	4	4	4	3	3	4	32.00	3.56
14	4	4	3	4	4	4	4	4	4	35.00	3.89
15	3	3	3	4	3	3	3	3	3	28.00	3.11
19	3	4	3	4	3	3	3	3	3	29.00	3.22
24	4	4	3	4	3	3	3	3	3	30.00	3.33
41	3	3	2	4	3	3	3	3	3	27.00	3.00
43	3	4	4	4	3	3	3	3	3	30.00	3.33
77	4	4	4	4	3	3	3	3	3	31.00	3.44
81	4	4	4	4	3	4	4	3	3	33.00	3.67
82	3	3	3	4	3	4	3	3	3	29.00	3.22
85	3	3	3	4	3	3	3	3	3	28.00	3.11
99	4	3	3	4	4	4	3	3	3	31.00	3.44
101	3	3	2	4	3	3	3	3	3	27.00	3.00
102	3	3	2	4	2	2	3	3	3	25.00	2.78
116	4	4	3	4	3	4	3	4	3	32.00	3.56
122	4	3	3	4	4	4	3	4	3	32.00	3.56
124	3	3	3	4	4	3	3	4	3	30.00	3.33
129	4	4	3	4	3	4	4	4	3	33.00	3.67
134	4	4	3	4	3	4	4	4	3	33.00	3.67
136	3	4	3	4	4	3	4	3	3	31.00	3.44
139	4	3	4	4	3	3	4	3	3	31.00	3.44
140	4	3	3	4	4	4	4	3	3	32.00	3.56
163	3	3	3	4	3	3	4	4	3	30.00	3.33
176	3	3	4	4	3	4	4	4	3	32.00	3.56

Σ Nilai Per Unsur	726	704	654	808	709	717	726	709	785		
NRR Per Unsur	3.59	3.49	3.24	4.00	3.51	3.55	3.59	3.51	3.89		
NRR Tertimbang Per Unsur	0.40	0.39	0.36	0.44	0.39	0.39	0.40	0.39	0.43	3.59	
IKM Unit Pelayanan										89.82	A (SANGAT BAIK)

Keterangan :
U1 -U9 = Unsur-Unsur Pelayanan
NRR =Nilai rata-rata
IKM =Indeks Kepuasan Masyarakat
-*) =Jumlah NRR Tertimbang
-**) =Jumlah NRR Tertimbang x 25
NRR Per Unsur =Jumlah nilai per unsur di bagi jumlah kuisioner yang terisi
NRR Tertimbang =NRR per unsur x 0,111 per unsur

No.	Unsur pelayanan	Nilai rata-rata
U1	Persyaratan	3.59
U2	Prosedur	3.49
U3	Waktu Pelayanan	3.24
U4	Biaya/tarif	4.00
U5	Produk Layanan	3.51
U6	Kompetensi Pelaksana	3.55
U7	Perilaku Pelaksana	3.59
U8	Sarana dan Prasarana	3.51

NO. RESPONDEN	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	NILAI RATA RATA PER RESPONDEN
						U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan			3.89

IKM UNIT PELAYANAN	
Mutu Pelayanan	:
A (Sangat Baik)	: 88,31 - 100,00
B (Baik)	: 76,61 - 88,30
C (Kurang Baik)	: 65,00 - 76,60
D (Tidak Baik)	: 25,00 - 64,99